

BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO  
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA JANGKA PANJANG  
DEKADAL

( R K P D )

KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2011-2015

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2011

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BARITO SE  
NOMOR : 7 TAHUN 2017  
TANGGAL: 8 AGUSTUS 2017  
TENTANG: RENCANA KERJA DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN TA  
2018.

BA B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Daerah yang selanjutnya dengan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk setiap tahun atau disebut dengan Pembangunan Tahunan. Konsistensi perencanaan pembangunan dapat sebagai dokumen rencana RKPD sebagai dokumen rencana tahunan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Proses penyusunan RKPD dilakukan kepada tahap penyusunan, Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD dan Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD. Musrenbang dan RKPD merupakan seluruh aspirasi masyarakat dan stakeholder yang diselaraskan dengan Dokumen Perencanaan yaitu Rencana Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) dijabarkan dari program lima tahun ke depan dan indikasi Rencana Program Prioritas Tahap terakhir dan Rancangan Akhir RKPD Penetapan RKPD oleh Kepala Daerah

Proses penyusunan RKPD berdasarkan keterkaitan dan konsistensi berbagai dokumen perencanaan sehingga akhirnya merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) dan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) Prioritas dan Anggaran ( PRA ) Rencana Kerja Anggaran Daerah ( RKPD ).

Salah satu proses per RKPD adalah pelaksanaan Musrenbang RKPD ini mengacu kepada pendekatan Teknokratik Bottom Up. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya sinergi, koordinasi, dan komunikasi antar ruang, antara lain antara pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Pendekatan teknokratik menggunakan pendekatan berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang bertugas untuk menyusun perencanaan belanja dan rencana pelaksanaan dan anggaran per

paka Proses partisipatif dengan mengikutsertakan seluruh pemang (stakeholder) Kabupaten Barito Selatan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang baik di RW, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RKPD) Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 271959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Negara Republik Indonesia Nomor 951 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2011 tentang Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23174 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Ketaatan dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan dan Wakil Kepala Daerah Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengalokasian Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1036)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 518);

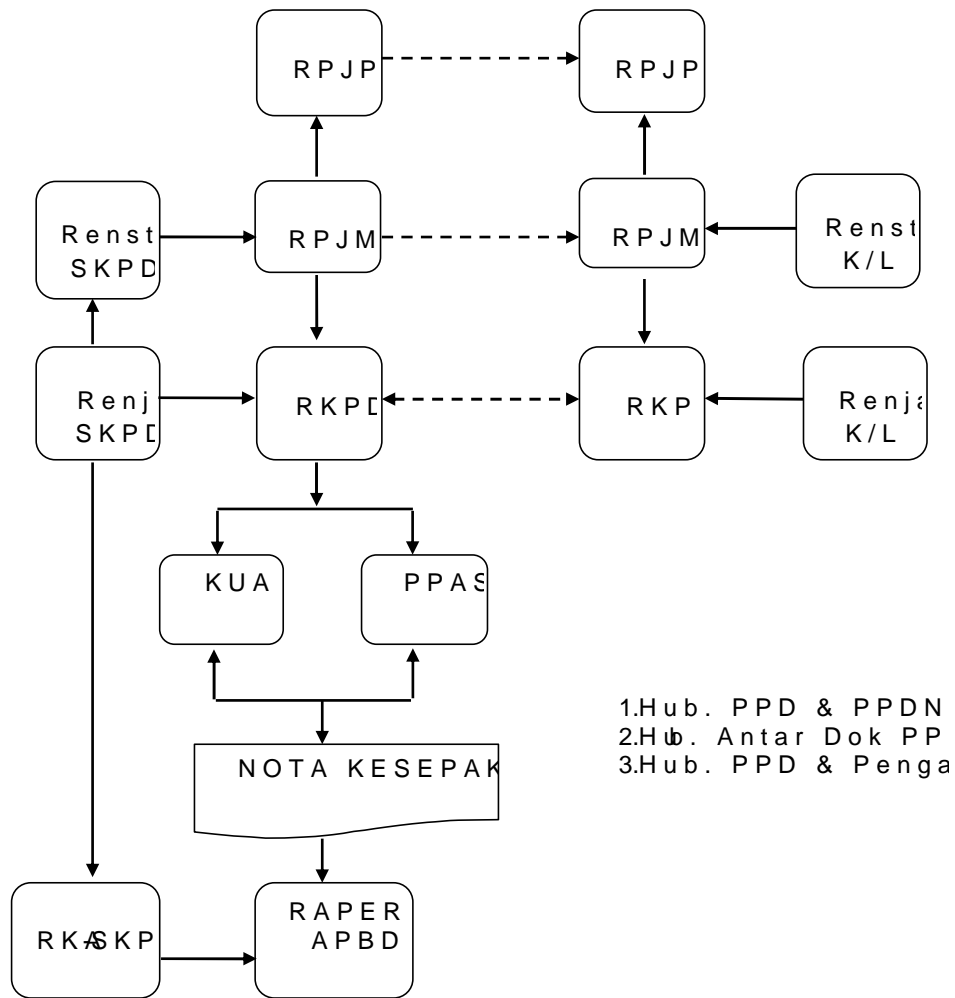
- 21 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 4);
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1);
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 4);
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Wilayah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012 Nomor 3);

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Ketentuan pada Bab 5 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang ditetapkan bahwa Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten/ Kota/ Kecamatan dan RPJMD Kabupaten/ Kota/ Kecamatan dan RPJMD Provinsi dan RPJMD Nasional serta mengacu kepada RPJMN agar terciptanya pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia.

Untuk jelasnya secara skematis dokumentasi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1  
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan



1.Hub. PPD & PPDN  
2.Hub. Antar Dok PP  
3.Hub. PPD & Penga

Dari gambar di atas, tampak bahwa sebagai dokumen perencanaan disusun dengan menjajaki kepatuhan aksi (stensi dengan metode bagai do perencanaan pembangunan dikam, ley, ke bdi, tkr, ju, program, dan ki tidak saling bertentangan namun selaras satu sama lain.

#### 1.4 Sistem Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan (1) Latar Belakang yang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD Dasar Hukum Penyusunan RKPD antar Dokumen (4) Sistematika Dokumen RKPD dan Penyusunan RKPD.
- BAB II: Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, memuat Gambaran Umum Daerah (2) Evaluasi

	Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun RPJMD; dan 3) Permasalahan Pembangunan Daerah
BAB III	Rencana Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah (1) Arahan Kebijakan Ekonomi dan (2) Arahan Kebijakan Keuangan Daerah.
BAB IV	Prioritas dan Sasaran Pembangunan (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang menjelaskan Misi dan Tujuan Sasaran Pembangunan berdasarkan (2) Prioritas dan Pembangunan
BAB V	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah evaluasi pembangunan dan tahun rencana (RKPD) kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
BAB VI	Penutup

### 1.5 Maksud dan Tujuan

RKPD Tahun 2014 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Umum APBD, RKUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan KUA dan PPA antara Bupati dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya akan sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan yang terintegrasi dengan rencana pembangunan RPJMD dan RPJPD yang dilaksanakan dengan:

1. Mensinkronkan agenda dan program Kabupaten Barito Selatan dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJPD (2014) dengan rencana kegiatan pemerintah dan konsentrasi dan tugas pembantuan.
2. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis jangka menengah dengan penjabaran dan penjabaran daerah.
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka sebagai patokan dalam penyusunan anggaran yang akan digunakan membiayai pembangunan daerah.
3. Memberikan arah bagi stakeholder dalam pembangunan daerah menyusun perencanaan yang partisipatif dalam pembangunan dan
4. Menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD melalui penetapan target (IKU) dalam rangka visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

5. Menetapkan program prioritas untuk dilaksanakan dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sebagai dasar penyusunan Renja SKPD dalam rangka penentuan
7. Sebagai rujukan utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KPUAS) dan Rancangan APBD Tahun 2018.
8. Merupakan media komunikasi antara pemangku pelaksanaan dan penyelenggara kegiatan daerah sebagai bahan kebijakan guna mendukung implementasi program kegiatan berikutnya.



BA B II

EVALUASI PERENCANAAN RENCANA TAHUNAN  
 CAPAIAN PEREMERINDAERAH

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Barito Selatan

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan perkembangan dan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat III di Kalimantan, Kabupaten Barito Selatan memiliki luas wilayah 12.664,90 ha. Setelah pemekaran pada dasar Undang-Undang Nomor 2022 tentang Rancangan Peraturan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah Selatan adalah 8 Kecamatan terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Selatan, Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Karau Kuala, Kecamatan Jenamas, dan Kecamatan Dusun Hilir.

Terkait luas Kabupaten Barito Selatan berdasarkan perkembangan kesetaraan tata batas administrasi dengan beberapa kabupaten tetangga, Utara dan Kabupaten Barito Timur, serta di dalam cakupan wilayah kabupaten Barito Selatan yang dikemukakan dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Barito Selatan tahun 2013 telah dilakukan pelacakan dan batas oleh tim tata batas antar Kabupaten dan tim tata batas Kabupaten Barito Selatan dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/329/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan. Batas Kabupaten Barito Selatan diperoleh luas Kabupaten Barito Selatan 702.009,90 (tujuh ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh) hektare (enam) Kecamatan, dengan nama masing-masing sebagai berikut :

Tab 2.1  
 Luas Wilayah Kabupaten Barito Selatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah
1	Jenamas	66.215,90
2	Dusun Hilir	136.973,90
3	Karau Kuala	82.522,90
4	Dusun Selatan	113.347,90
5	Dusun Utara	127.164,90
6	Gunung Bintang Awai	175.785,90
JUMLAH TOTAL		702.009,90

Sumber : Perda Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014

- Secara administrasi batas wilayah Kabupaten Barito Selatan adalah:
- Sebelah Utara Kabupaten Barito Utara.
  - Sebelah Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Kapuas
  - Sebelah Barat Kabupaten Kapuas
  - Sebelah Timur Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Tabalong Prov Kalimantan Selatan.

Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah dan batas administrasi dapat dilihat pada Gambar 2.1

Table 2  
Luas Daerah Menurut Kecamatan-Rata-Rata Tinggi Permukaan Laut Kabupaten Barito Selatan

No.	Kecamatan	Tinggi Rata-Rata Permukaan Laut (m)	Luas Area (ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)
1	Jenamas		66.215,9	8,0
2	Dusun Hilir		136.973,1	23,3
3	Karau Kuala		82.522,9	12,4
4	Dusun Selatan		113.347,1	20,7
5	Dusun Utara		127.164,4	13,5
6	Gunung Bintang		175.785,1	21,8
	Barito Selatan		702.009,4	100,0

Sumber: Barito Selatan Angka 2014

Gambar 2.1 Peta Pembagian Wilayah dan Batas Administrasi Kabupaten Barito Selatan

## 2. Letakan Koordinat Geografis

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di Buntok. Secara geografis terletak membujur dengan letak astronomis 2° 25' 25" Selatan dan 111° 54' BT.

Ditinjau dari letaknya Kabupaten Barito Selatan membentangi Kota j perlintasan yang menghubungkan antara Kabupaten Palangka Raya Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Utara Banjarmasin. Dengan demikian lokasi Kabupaten ini merupakan lokasi strategis orang dan barang, sehingga menjadi kota transit, baik dari arah Palangka Raya. Sedangkan dilihat dari letak wilayah dalam kes Dengan letak dan posisi demikian sebagai wilayahnya cenderung arah Provinsi Kalimantan Tengah.

## 3. Topografi dan Kelerengn

Sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan daerah berkisar antara 400 meter dari permukaan laut, kecuali Kecamatan Gunung Bintang Awai yang merupakan daerah perbukitan.

Pada bagian tengah mulai dijumpai perbukitan dengan lereng miring, dengan pola intensitas kemiringan yang meningkat merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi topografi memanjang dari barat daya ke timur.

Sejalan dengan fisiografi wilayah tersebut pada daerah-daerah di kawasan atas sebagai lereng yang rendah berdasar pada data di kawasan tersebut.

Table 2.3  
Luas Daerah Kemiringan Lahan  
di Kabupaten Barito Selatan

No.	Kemiringan Lahan	Luas (Ha)
1	0-2 %	555.7
2	2-15 %	199.0
3	15-40 %	107.1
4	>40 %	2098
	Jumlah	883.0

Sumber: RTRWP Kalimantan Tengah

## 4. Geologi

Kabupaten Barito Selatan berfasadasi geologi yang tergolong Informasinya untuk pengembangan wilayahnya meliputi, batubara, tambang, air tanah, daya dukung dan kerawanan fisik.

Berdasarkan formasi batuanannya, potensi kesuburan tanah di ketinggian. Penyebaran formasi batuanannya cenderung di dataran dan lau

berawa dan bergambut; Batuan sedimen yang kaya akan mine  
 Batuan sedimen klastik, mineral kuarsa dan lempung; amateria  
 vulkanik tua, menghasilkan jenis tanah yang kaya unsur hara;  
 Jenis tanah daerah selatan berbeda dengan jenis tanah yang t  
 Jenis tanah yang terbentuk erat hubungannya dengan bahan in  
 medannya. Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di  
 adalah sebagai berikut:

- Aluvial, dijumpai di sepanjang kiri kanan jalur aliran sungai Bar  
 sampai ke Utara sungai Barito. Tanah endapan sungai ini m  
 dataran banjir dari bahan induk liat dan pasir lanjanterli  
 jelas bentuk wilayah datar, warna coklat tua sampai coklat l  
 drainase agak terlambat dan reaksi tanah masam. Lebih mas  
 lebih dalam dan sering tergenang, sehingga dijumpai tanah aluv  
 memanjang disamping tanah aluvial, bersolum dalam, terben  
 sampai agak kasar, drainase terhambat dan reaksi tanah mas  
 terdapat tanah gley yang berasosiasi dengan endapan tanah  
 pelapukan lanjut. Tanah yang terbentuk dikenal sebagai tanah  
 berasosiasi dengan organosol sehingga disebut humus, komp  
 mempunyai solum dalam, warna gelap, tekstur dari halus  
 terhambat dan reaksi tanah masam. Solum dalam, tekstur h  
 sampai gelap, drainase tergenang periodik sampai baik, reak  
 tinggi sampai sedang.
- Regosol dijumpai menyebar dibagian tengah kabupaten Barito s  
 dalam terbentuk dari bahan induk endapan pasir yang didom  
 wilayahnya datar sampai berombak dengan pasir ketambahan mu  
 tekstur kasar, drainase baik dan reaksi tanah masam.
- Padsol merupakan jenis tanah yang cukup luas di jumpai me  
 hulu sungai. Tanah ini telah mengalami perkembangan lanjut  
 induk batu liat, bentuk wilayahnya berombak warna dari merah kec  
 sampai merah kuning, tekstur halus sampai kasar, drainase b  
 Jenis tanah lain adalah litosol yang mempunyai solum dangk  
 puncak perbukitan Muller dengan ketinggian sekitar 500 s  
 keadaan medan yang terjal dan curah hujan tinggi menyeba  
 sehingga terjadilah tanah dangkal berbatu.
- Organosol merupakan tanah organik (yang terdapat disebelah Ba  
 Barito mulai dari selatan hingga ke bagian Utara Kabupaten  
 gambut umumnya dalam (90 cm) terdapat pada bentuk wila

cekungan, warna merah kehitam, drainasi sangat terhambat, tanah sangat masam.

- Podsolik terletak menyebar di bagian tengah dan hilir. Solum a bahan induk batu pasir (kwarsa) pada bentuk wilayah berombak coklat tua kemiringan sangat pucat, tekstur sedang, drainase a reaksi masam.
- Podsolik terletak di hulu Kabupaten Barito Selatan serta sebelah ini menyebar di daerah bergelombang, mempunyai tekt kecoklatan
- Regosol tersebut terletak di Utara bagian tengah dari kab kecamatan Dusun Utara.

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis tanah dan penyebarannya dapat dilihat pada Tabel

Tabel 4  
Jenis Tanah Kabupaten Barito Selatan

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Aluvial	263.15	41,
2.	Organosol	131.89	20,
3.	Podsolik	71.01	11,
4.	Podsol	48.92	7,
5.	Litosol	39.94	6,
6.	Kambisol	27.26	4,
7.	Regosol	52.63	8,

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Selatan, 2009

## 5. Hidrologi

Sejalan dengan kondisi fisik sungai walaupun merupakan sungai verval yang hingga ke sektor ketengahan pengaruh pasang air laut pada daerah relatif musim kemarau. Sebaliknya di musim hujan, air sangat deras yang dilintasinya. Rawa gambut terdapat di berbagai daerah yang terdapat rawa pasang surut. Wilayah ini banyak memiliki daerah dengan verval tinggi bahkan beriak.

Dengan demikian, kawasan hulu sangat layak untuk dikembangkan sebagai disamping sebagai sumber air mineral. Kawasan berawa disekitar saat kelebihan air musim penghujan.

Dengan satu sungai besar (Sungai Barito) dan banyak sungai lain menjadi salah satu ciri khas Kabupaten Barito Selatan. Sungai sepanjang 900 km dengan lebar rata-rata 8 m merupakan sungai terpanjang di Barito Selatan.

## 6. Klimatologi

Kabupaten Barito Selatan wilayah yang beriklim tropis sehingga oleh perubahan angin yang melewatinya selain itu juga dipengaruhi

temperatur dan curah hujan ikut berpengaruh terhadap kondisi tahun ke tahun.

Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Kabupaten Barito yaitu siang hari mencapai sekitar 34,2°C dan malam hari mencapai sekitar 22,3°C. Curah hujan per tahunnya 4.978 mm.

Untuk lebih jelasnya mengenai temperatur dan curah hujan di Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.5  
Temperatur, Kelembaban Relatif, dan Rata-rata Tekanan Udara di Kabupaten Barito Selatan

No.	Bulan	Temperatur (°C)		Kelembaban Relatif (%)		Rata-rata Tekanan Udara (mb)
		Maks	Min	Maks	Min	
1	Januari	34,00	22,30	98	59	1.04120
2	Pebruari	34,00	22,20	100	55	1.04150
3	Maret	35,40	22,00	100	53	1.04100
4	April	34,60	22,10	99	55	1.03140
5	Mei	35,10	22,00	98	52	1.03170
6	Juni	34,30	22,60	98	51	1.03130
7	Juli	34,80	20,60	99	50	1.04100
8	Agustus	35,40	20,60	98	41	1.01140
9	September	35,20	22,60	98	45	1.04140
10	Oktober	35,00	22,00	100	40	1.04170
11	November	35,60	22,80	99	49	1.03110
12	Desember	35,00	22,80	100	50	1.03190
	Rata-rata	34,94	22,12	98,92	50,0	1.04,01

Sumber: Barito Selatan Dalam Angka 2014

Tabel 2.6  
Banyaknya Curah Hujan, Kecepatan Angin, dan Penyerapan Matahari di Kabupaten Barito Selatan

No.	Bulan	Hujan		Kecepatan Angin (Knots)	Penyerapan Matahari (%)
		Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan		
1	Januari	64,50	26	220	50,40
2	Pebruari	55,40	22	1600	36,60
3	Maret	72,20	20	1500	58,80
4	April	77,50	15	1600	62,50
5	Mei	25,50	14	1500	68,10
6	Juni	77,00	15	1100	32,10
7	Juli	41,00	6	1200	75,70
8	Agustus	4,80	7	1000	72,40
9	September	-	-	1100	2,40
10	Oktober	27,80	8	1300	10,90
11	November	1000	22	1500	49,70
12	Desember	51,60	20	1100	18,00
	Rata-rata	4978	14,58	13,92	44,80

Sumber: Barito Selatan Dalam Angka 2014

## 7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan faktor yang sangat berkaitan dengan adanya tatanan penggunaan lahan maka penataan ruang merupakan kondisi dimana terjadi ketidaksesuaian lahan dengan kemampuan mempengaruhi penataan ruang. Penggunaan lahan merupakan dampak masyarakat di wilayah yang pada dasarnya merupakan gabungan antara masyarakat dengan tingkat teknologi, jenis usaha, serta jumlah penggunaan tanah di Kabupaten Barito Selatan terdiri atas perikanan dan lain-lain.

Luas penggunaan lahan pertanian berdasarkan Kabupaten Barito Selatan tahun 2015 adalah 2.123 Ha, dengan seluasnya merupakan sawah pengairan irigasi sederhana.

Tabel 17  
Luas lahan Sawah menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Barito Selatan

No	Kecamatan	Irigasi	Non Irigasi		Jumlah Total
			Tadah Hujan	Lainnya	
1	Jenamas	-	-	5.04	5.04
2	Dusun Hilir	-	-	2.00	2.00
3	Karau Kuala	-	1.25	-	1.25
4	Dusun Selatan	-	29.04	-	29.04
5	Dusun Utara	-	4.08	-	4.08
6	Gunung Bintang	-	7.01	-	7.01
	Barito Selatan	-	35.09	7.04	42.134

Sumber: Barito Selatan Dalam Angka 2016

Kabupaten Barito Selatan sebagai kawasan hutan mempunyai luas 70.200,9 Ha yang terbagi dalam kawasan hutan produksi alam dan pelestarian, hutan produksi (Hutan produksi terbatas, areal penebar dan penggunaan lain). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

Tabel 1.10  
Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Kabupaten Barito Selatan 2015

No	Fungsi Peruntukan	Luas (Ha)
1	Hutan Lindung	82707
2	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	76829
3	Hutan Produksi Terbatas	85070
4	Hutan Produksi Tetap	20345
5	Hutan Produksi dapat di konversi	93.37
6	Areal Penggunaan Lain	14071
7	Sungai	15607
	Barito Selatan	70200

Sumber: Barito Selatan Dalam Angka 2016

Hutan alam Barito Selatan memiliki berbagai macam ragam jenis lainnya yang memiliki potensi ekonomi cukup tinggi jika diusahakan seperti berbagai jenis rotan, rotan, gaharu dan lain-lain. Produknya menurut jenis produksi di Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut:

1. Kayu bulat mengkilap 16,5 m<sup>3</sup>/tahun
2. Kayu gergaji 2,6 m<sup>3</sup>/tahun

#### 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan No. 20/2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan tahun 2014-2019 untuk pengembangan wilayah Kabupaten Barito Selatan yaitu untuk: 1) Rencana Lindung; dan 2) Rencana untuk Kawasan Budaya.

##### 1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung meliputi:

###### a. Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung tersebar di Dusun Hilir, Karau Kuala, dan Gunung Bintang Awai dengan luas kurang lebih 67.560 (lima ratus enam puluh enam koma enam puluh) hektar.

###### b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya yaitu kawasan resapan air di Kecamatan Dusun Utara, Gunung Bintang Awai, Barito Selatan, Karau Kuala dan Dusun Hilir dengan luas kurang lebih 7.800 (tujuh ratus delapan puluh) hektar.

###### c. Kawasan perlindungan setoran

Kawasan perlindungan setoran meliputi kawasan sempadan sungai dan sempadan danau/waduk.

Kawasan sempadan sungai dengan luas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) hektar terdapat di sepanjang ketentuannya perlindungan pada sungai besar di luar kawasan minimum 100 (seratus) meter dengan terdapat samudra di luarnya ditetapkan minimum 50 (lima puluh) meter; besar anak sungai yang melewati kawasan permukiman ditetapkan 10 meter.

Kawasan sempadan danau atau waduk kawasan sempadan danau/waduk dengan luas 1.500 (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh) hektar yang tersebar di Kabupaten Barito Selatan, meliputi Madara, Danau Karen, Danau Maguru, Danau Buntal, dan



Kaaren, Danau Raya, Danau Bundar, Danau Mangkarai, Danau Melawen, Danau Jutuh, Danau Sadar, Danau Hampa Lambuhang, Danau Jaman, Danau Letek, Danau Marau, Danau Danau Surapanji, Danau Kala Rikuta, Danau Mut Danau Sanggu, Danau Limut, Danau Sababilah, Danau M Jayo, Danau Mentarem, Danau Pulut, dan Danau Telang bentuk kondisi fisik danau/waduk (rata seluas 10) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

- d. Kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam  
Kawasan Suaka Alam atau kawasan pelestarian alam meliputi delapan danau (sembilan koma lima hektar) berupa Habitat Orca di Madara, dan Batang Puning.
- e. Kawasan ekosistem air hitam  
Kawasan ekosistem air hitam adalah kawasan hutan rawa yang gambut tebal, atau sering disebut sebagai kubah gambut, seluas (sungai dan danau) airnya berwarna hitam, dengan luas tujuh ratus sembilan belas koma nol dua) hektar.
- f. Kawasan perairan  
Kawasan perairan dimaksud adalah kawasan seluas (sungai dan danau) airnya berwarna hitam, dengan luas tujuh ratus sembilan belas koma nol dua) hektar.

## 2. Kawasan Budaya

Kawasan budidaya meliputi:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi  
Kawasan peruntukan hutan produksi terbagi menjadi kawasan peruntukan hutan produksi tetap (HPT) yang terletak di Kecamatan Gunung Baimata, Dusun Selatan dengan luas 507,00 hektar dan kawasan peruntukan hutan produksi tetap (HP) yang tersebar di dusun utara, kecamatan gunung baimata, dusun selatan, kecamatan karau kuala dengan luas 203,45 hektar. Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonservasi (HPK) yang tersebar di kecamatan dusun selatan, kecamatan dusun hilir dan kecamatan jenam dengan luas 337,9 hektar.
- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat



kecamatan dengan luas kurang lebih 24.655,45 (dua puluh  
puluh lima koma empat hektar lebih) permukiman perk  
pengembangannya diarahkan ke arah, dan Sanggu  
Dusun Selatan dengan luas kurang lebih 1.500,20 (serib  
hektar.

g. Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri 2.120,35 (dua ribu seratus dua pulu  
lima) hektar terdiri atas kawasan peruntukan industri dan kawasan  
industri sedak kawasan peruntukan industri rumah tangga.

Kawasan peruntukan industri terbesar adalah kawasan industri karet di Kec  
Dusun Selatan. Kawasan industri Crop Palm Oil (CPO) dan kawasan  
kawasan industri pencampuran batubara di sepanjang s  
Utara, Dusun Selatan, Karau Kuala, dan Dusun Hilir.

Kawasan peruntukan industri lainnya adalah kawasan industri rotan di Kec  
Dusun Hilir, Dusun Utara, dan Dusun Selatan; kayu di Kec  
Gunung Bintang Awa; kawasan industri pengolahan bahan konstruk  
di Kecamatan Dusun Selatan.

Kawasan peruntukan industri rumah tinggal di Kecamatan Dusun Selatan  
rotan dan purun di kecamatan Dusun Utara dan Dusun Selatan  
Kawasan industri penganeekaragaman pangan di Kecamatan Dusun  
Bintang Awa.

g. Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata 50,80 (lima puluh koma delapan  
terdiri atas terdiri atas wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan.

Kawasan peruntukan wisata alam adalah kawasan wisata Gunung Bawo dan/atau Liat  
Bintang Ara dan Desa Bukit Kahir di Dusun Senango di Desa

Kawasan peruntukan wisata alam adalah kawasan wisata Gunung Bawo dan  
Ara; kawasan peruntukan wisata buatan adalah kawasan wisata ku

h. Kawasan areal penggunaan lain;

Kawasan areal penggunaan lain adalah kawasan areal penggunaan lain  
ribu empat ratus dua puluh delapan koma dua puluh  
Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Gunung Bintang Awa  
Kecamatan Karau Kuala, Kecamatan Dusun Hilir dan Kecan

i. Kawasan holding zone

Kawasan Yang Belum Ditetapkan Perubahannya adalah kawasan hutan  
hutan yang diusulkan perubahan peruntukan kawasan hutan  
yang diusulkan menjadi kawasan hutan oleh Gubernur Kalimantan  
revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang



pertanian (tanaman pangan) hutan/kawasan peruntukan (tanaman pangan) berada di sebagian wilayah kecamatan Gunung Bintang Awai, kecamatan Sredaan, Du kecamatan Karau kecamatan Dusun Hilir, dan kecamatan Jenamas seluas ratus tujuh belas kilometer lima belas)

- 7) Kawasan peruntukan pertanian (perkebunan rakyat) y perundang-an di bidang kehutanan masih sebagai alam/kawasan pelestarian alam, selanjutnya disebut peruntukan perkebunan rakyat. Kawasan hutan/kawasan (perkebunan rakyat) sebagai wilayah kecamatan Dusun 86,96 (delapan puluh enam kilometer) hektar
- 8) Kawasan peruntukan pertanian (perkebunan rakyat) y perundang-an di bidang kehutanan kawasan hutan selanjutnya disebut kawasan peruntukan perkebunan rakyat Kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (perke sebagian wilayah kecamatan Karau Kuala seluas 1.638,1 puluh delapan kilometer lima) hektar.
- 9) Kawasan peruntukan pertanian (perkebunan rakyat) y perundang-an di bidang kehutanan masih sebagai kawasan terbatas, selanjutnya disebut kawasan peruntukan perkebunan rakyat. Kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian di sebagian wilayah kecamatan Dusun Selatan seluas empat puluh kilometer sembilan) hektar.
- 10) Kawasan peruntukan pertanian (perkebunan rakyat) y perundang-an di bidang kehutanan masih sebagai kawasan tetap, selanjutnya disebut kawasan peruntukan perkebunan rakyat Kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (perke sebagian wilayah kecamatan Dusun Utara, kecamatan kecamatan Dusun Selatan, kecamatan Karau Kuala, kecamatan Jenamas seluas 28.079,26 (dua puluh delapan kilometer enam) hektar.
- 11) Kawasan peruntukan pertanian (perkebunan rakyat) y perundang-an di bidang kehutanan kawasan hutan produktif yang dapat dikonversi, selanjutnya disebut kawasan perkebunan rakyat. Kawasan hutan/kawasan peruntukan rakyat) berada di sebagian wilayah kecamatan Gunung Bintang Awai, kecamatan Dusun Selatan, kecamatan Ka

Jenamas seluas 16.110,27 (enam belas ribu dua ratus dua puluh dua hektar).

- 12 Kawasan peruntukan peternakan yang berdasarkan perda di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan peternakan berada di sebagian wilayah kecamatan Jenamas seluas 528,98 (lima ratus dua puluh delapan) hektar.
- 13 Kawasan peruntukan peternakan yang berdasarkan perda di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan/kawasan peruntukan peternakan berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Hilir dan kecamatan Jenamas seluas lima ratus tujuh puluh sembilan) hektar;
- 14 Kawasan peruntukan permukiman yang berdasarkan perda di bidang kehutanan masih sebagai kawasan suaka alam, selanjutnya disebut kawasan peruntukan permukiman. Kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Selatan dan kecamatan Dusun Hilir seluas lima puluh empat (lima puluh) hektar.
- 15 Kawasan peruntukan permukiman yang berdasarkan peraturan perda di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman berada di sebagian wilayah kecamatan Karau Kuala, dan kecamatan Dusun Hilir, seluas lima puluh lima (lima puluh) hektar.
- 16 Kawasan peruntukan permukiman yang berdasarkan perda di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi tetap disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman berada di sebagian wilayah kecamatan Gunung Binkang dan kecamatan Dusun Selatan seluas empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan hektar.
- 17 Kawasan peruntukan permukiman yang berdasarkan perda di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi yang akan dikonservasi, selanjutnya disebut kawasan peruntukan permukiman. Kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Utara, kecamatan Gunung Binkang dan kecamatan Dusun Selatan seluas empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan hektar.

- Selatan, kecamatan Karau Kuala, dan kecamatan Dusun
- ribu dua ratus tujuh puluh sembilan komatiga puluh sembilan
- 18) Kawasan peruntukan pariwisata yang berdasarkan per-  
dibidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan pr-  
disebut kawasan peruntukan wisata. Kawasan h-  
peruntukan pariwisata berada di sebagian wilayah k-  
Awai seluas (604,5 ratus lima puluh satu) hektar.
  - 19) Kawasan peruntukan pariwisata yang berdasarkan per-  
di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan  
disebut kawasan peruntukan wisata. Kawasan hutan/ ka-  
peruntukan pariwisata berada di sebagian wilayah k-  
Awai seluas 25,64 (dua puluh lima) hektar.
  - 20) Kawasan peruntukan kawasan bumi perkemahan yan-  
perundangan di bidang kehutanan masih sebagai k-  
yang dapat di konversi, selanjutnya disebut kawasan  
bumi perkemahan. Kawasan hutan/ kawasan peruntukan  
di sebagian wilayah kecamatan Dusun Selatan seluas 20,24 (c-  
dua puluh empat) hektar.
  - 21) Kawasan peruntukan areal penggunaan lain yang  
perundangan di bidang kehutanan masih sebagai  
alam/kawasan suaka alam, selanjutnya disebut kawasan  
areal penggunakan suaka alam. Kawasan hutan/ kawasan peruntukan area  
berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Selatan  
delapan (lima puluh satu) hektar.

### 2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana alam, meliputi:

- a. Wilayah rawan bencana longsor tebing sungai;
- b. Wilayah rawan bencana longsor, rockfall dan landslide;
- c. Wilayah rawan bencana banjir.

Wilayah rawan bencana longsor tebing sungai meliputi Sungai Banting  
dan Sungai Wai di Kecamatan Dusun Utara. Sedangkan areal rawan bencana  
Gunung Banting di Kecamatan Dusun Utara. Sedangkan areal rawan bencana  
meliputi seluruh kecamatan yang berada di sepanjang aliran Sungai Ayuh.

#### 2.1.1.4 Demografi

##### 1. Penduduk dan Ketenagakerjaan

###### a. Penduduk

Penduduk Kabupaten Barito Selatan berdasarkan proyeksi tahun 2019 berjumlah 13.987 jiwa, yang terdiri dari 67.358 penduduk laki-laki (51%) dan penduduk perempuan sebanyak 46.29 jiwa (49%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini.

Tab 211.1  
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin  
Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Jenamas	4616	4.68	9.24
2.	Dusun Hili	8401	791	16312
3.	Karau Kuala	7913	7902	15815
4.	Dusun Selatan	27675	26809	54484
5.	Dusun utara	8622	8.56	16.78
6.	G.B. Awai	10131	9183	19314
Jumlah		67.358	64.629	13.987

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka Tahun 201

###### b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kabupaten Barito Selatan berdasarkan tahun 2019 adalah 47,9 jiwa/Km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya tingkat kepadatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tab 211.2  
Tingkat Kepadatan Penduduk Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Tingkat Kepadatan (jiwa/ Km <sup>2</sup> )
1.	Jenamas	9.24	662,16	14,0
2.	Dusun Hilir	16312	1369,73	1191
3.	Karau Kuala	15815	825,23	19,16
4.	Dusun Selatan	54484	1133,47	4807
5.	Dusun Utara	16.78	1271,64	131,9
6.	G. Bintang Awai	19314	1757,86	1099
Jumlah		13.987	7.020,09	117,34

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka Tahun 201

Kecamatan Dusun Selatan merupakan penyumbang 41,44% (41,44%), hal ini disebabkan karena lokasi Kabupaten Barito Selatan sisanya tersebar relatif merata pada lima kecamatan lainnya.



c. Jumlah Desa dan Kelurahan

Selain kepadatan penduduk di atas, wilayah Kabupaten B Kecamatan, yang terdiri 86 Desa dan 7 Kelurahan. Untuk le Kelurahan per Kecamatan dapat dilihat pada tabel

Tab 2113  
Jumlah Desa dan Kelurahan per Kecamatan  
di Kabupaten Barito Selatan

No.	Kecamatan	Jumlah		Jumlah
		Desa	Kelurah	
1.	Jenamas	4	1	5
2.	Dusun Hilir	9	1	10
3.	Karau Kuala	10	1	11
4.	Dusun Selatan	24	3	27
5.	Dusun Utara	18	1	19
6.	G. Bintang Awai	21	-	21
	Jumlah	86	7	93

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka Tahun 2016

d. Komposisi Penduduk Berumur keatas menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data Barito Selatan Dalam Angka Tahun 2016 komposisi penduduk menurut jenis pendidikan di Kabupaten Barito Selatan. Dapat di di bawah ini :

Tab 2114  
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persen (%)
1	2	3	4
1	Tidak/Belum Tamat	10.358	16,69
2	SD	12.835	20,68
3	SLTP	13.274	21,38
4	SMTA Umum	161.30	25,98
5	SMTA Kejuruan	2.837	4,57
6	Diploma/Universitas	6.645	10,70
	JUMLAH	62.079	100,00

Sumber Data: Barsel Dalam Angka Tahun 2016

e. Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang pengeluarannya per kapita bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah minimum makanan yang disetor oleh keluarga per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan kesehatan. Garis kemiskinan Kab. Barito Selatan Tahun :  
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Barito Selatan

tahun. Pada tahun 2014 persentase penduduk miskin di Bari atau sebanyak 8.030

Gambar 2  
 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Barito Se  
 Tahun 2007 s.d. 2014

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan,

Berdasarkan data, terkait dengan jumlah penduduk miskin di l Selatan dari tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami penurunan y signifikan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin adalah 30,8 jiwa. Sedangkan untuk prosentase penduduk 2010 adalah sebesar 7,07% dan pada tahun 2014 turun menjadi 6,13%. Untuk jumlah penduduk miskin ini dapat dilihat pada tabel 2.15 dibawah ini :

Tabel 15  
 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Barito Selatar

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
Penduduk Miskin (%)	7,07	7,56	7,25	6,26	6,13
Penduduk Miskin (0)	10,60	9,6	9,3	8,1	8
Garis Kemiskinan (Rp)	261.6	275.7	296.7	311.16	322.0

Sumber : BPS:Barito Selatan Tahun 2015

f. Ketenagakerjaan

Dari keseluruhan penduduk Barito Selatan 95,7% merupakan 5r 15 tahun ke at yang merupakan penduduk usia produktif. Berdasarkan komposisi

angkatan kerja jurut kelompok umur di Barito Selatan didominasi berumur 49,5 tahun. Sebagian atau 42,49% (13,3%) penduduk berumur 1 tahun ke atas bekerja di sektor Pertanian, sedangkan sektor lainnya adalah Keuangan dan Jasa 27,01% dan 10,46%.

### 1) Penduduk Usia Kerja

Pertumbuhan penduduk usia kerja yang merupakan refleksi dari pertumbuhan secara keseluruhan sangat mempengaruhi perumbuhan angkatan kerja. Dengan kata lain bahwa keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi penduduk yang masuk dalam pasar kerja, yaitu penduduk yang mencari pekerjaan.

Table 16  
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Utama di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015

Kegiatan Utama	Total
1	2
1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	92.112
2. Angkatan Kerja	64.512
3. Bukan Angkatan Kerja	27.600
4. TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	69,9%
5. Bekerja	62.036
6. TPT (Tingkat Partisipasi Terbuka)	3,7%

Sumber: BPS: Barito Selatan tahun 2015

Table 16 menunjukkan bahwa dari total jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut jenis kelamin di Kabupaten Barito Selatan adalah sebanyak 64.512 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 64.512 jiwa merupakan Angkatan Kerja dan sebanyak 27.600 jiwa merupakan Bukan Angkatan Kerja. Dari Angkatan Kerja sebanyak 62.036 jiwa atau 96,16% bekerja dan 2.476 jiwa atau 3,84% tidak bekerja. Sedangkan untuk Bukan Angkatan Kerja sebanyak 10.120 jiwa merupakan siswa sekolah, sebanyak 1.100 jiwa adalah untuk kegiatan lainnya sebanyak 8.920 jiwa.

### 2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara keseluruhan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 berada pada posisi 69,136% yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk Kabupaten Barito Selatan yang terdapat lebih banyak, 69 orang di antara mereka yang mencari pekerjaan di Kabupaten Barito Selatan yang aktif secara ekonomi.

Tabel 17  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kelamin  
Di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010-2012

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Tingkat Partisipasi (%)	Rata-rata
1	2010	89,96	47,52	69,67	68,71
2	2011	84,32	50,64	67,47	
3	2012	84,76	52,12	68,73	

Sumber BPS: Barito Selatan tahun 2015

### 3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sentase penduduk berumur keatas yang termasuk kedalam kelompok pengangguran terbuka pengangguran terbuka ini adalah penduduk yang sudah selesai mempersiapkan usaha atau mereka yang belum bekerja walaupun ada pekerjaan, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mendapatkan pekerjaan.

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Barito Selatan, dimana pada tahun 2009 angka pengangguran terbuka sebesar 2,31% dan pada tahun 2010 sebesar 1,73% dan pada tahun 2011 sebesar 1,19% dan pada tahun 2012 sebesar 1,60% dan pada tahun 2013 sebesar 2,17% dan pada tahun 2014 sebesar 2,8%.

Tabel 18  
Tingkat Pengangguran Terbuka  
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009-2014

No	Jenis Kelamin	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Laki-laki		1,53	1,19	1,60		2,8
2	Perempuan		12,35	4,63	1,93		4,74
3	Total	4,00	5,51	2,52	1,73	2,17	3,77

Sumber BPS: Barito Selatan tahun 2015.

### 4) Lapangan Usaha

Sama halnya dengan kabupaten lainnya di Indonesia, sektor pertanian adalah mata pencaharian penduduk Kabupaten Barito Selatan yang banyak menyumbang terhadap perekonomian masyarakat, sosial dan budaya penduduk di Kabupaten Barito Selatan. Selama lima tahun keatas yang lalu mengalami lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Barito Selatan dilihat pada tabel 2.18 dibawah ini:

Tabel 19  
 Jumlah Penduduk Berpendapatan Utama dan Jenis Kelamin Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015

No	Lapangan usaha	Tahun 2015			
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Pertanian	21.466	9.34	30.82	53,75
2	Pertambangan dan Pertambangan	112	0	112	1,96
3	Industri dan Pertambangan	2.100	98	3.098	5,39
4	Listrik, Gas dan Air	161	0	161	0,28
5	Konstruksi	2.160	0	2.160	3,77
6	Perdagangan dan Jasa Akomodasi	352	369	7.22	12,60
7	Angkutan dan Komunikasi	131	19	150	2,62
8	Lembaga Keuangan dan Persewaan/Perdagangan	806	0	806	14,11
9	Jasa Kesehatan dan Sosial serta perorangan	5.700	4.750	10.450	18,22
	Jumlah	38.300	18.900	57.200	100,00

Sumber BPS: Barito Selatan tahun 2015

## 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 1. Pendapatan Regional

Struktur ekonomi yang dibebani oleh pertumbuhan yang bergerak menjadi ekonomi. Sektor dengan nilai tambah yang besar menjadi tulang punggung Kabupaten Barito Selatan dan semakin besar pula tingkat ketergantungan terhadap sektor ekonomi tersebut.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan usaha maupun masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang meningkatkan kemakmuran dan taraf hidup. Karena itu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dari pada laju pertumbuhan penduduknya merupakan keberhasilan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

#### PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu wilayah tertentu pada suatu periode. Pada tahun 2015 besarnya PDRB adalah 444,89 miliar rupiah atau 0,35% dari total PDRB atas dasar harga berlaku, dimana sektor pertanian memberikan sumbangsanya 1,96% dan sektor jasa kesehatan dan sosial serta perorangan memberikan 18,22%. Kemudian disusul oleh sektor industri dan pertambangan 5,39% dan sektor transportasi pergudang 2,62%. Keberhasilan PDRB menurut lapangan usaha dapat dilihat pada gambar 2.3 di bawah ini.

Gambar 2.3  
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan, 2016

Selanjutnya perkembangan PDRB Kabupaten Barito Selatan berdasarkan tahun 2012 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.20  
PDRB Kabupaten Barito Selatan Atas Dasar Berlaku  
Menurut Lapangan Usaha 2012-2015 (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	697,	762,	844,	918,
2.	Pertambangan & Pengolahan Mineral	936,	987,	918,	842,
3.	Industri Pengolahan	206,	217,	249,	291,
4.	Pengadaan Listrik, Gas, dan Panas	0,99	1,005	1,17	1,91
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Air Laut	421,	4,4	5,1	6,1
6.	Konstruksi	184,	204,	241,	283,
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Akomodasi dan Reparasi Mobil dan Motor	241,	261,	297,	336,
8.	Transportasi dan Pergudangan	316,	355,	397,	484,4
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	53,4	63,8	73,2	86,7
10.	Informasi dan Komunikasi	38,6	41,7	48,7	54,7
11.	Jasa Keuangan dan Real Estate	137,	156,	194,	204,
12.	Real Estate	66,6	74,4	87,5	101,
13.	Jasa Perusahaan	0,5	0,5	0,6	0,7
14.	Adm Pemerintahan, dan Jaminan Sosial	204,	234,	267,	300,
15.	Jasa Pendidikan	210,	236,	258,	320,
16.	Jasa Kesehatan dan Sosial	77,6	84,8	97,2	117,
17.	Jasa Lainnya	63,4	73,8	83,8	95,5
	PDRB	3.439	3.761	4.068	4.448

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan

\* : Angka sementara

\*\* : Angka untuk tahun 2014 dan 2015

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010

Untuk melihat perkembangan pertumbuhan rekor di tahun tersebut dapat tergambar melalui penyajian PDRB atas Dasar Harga Konstan Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Barito Selatan tahun 2014 adalah Rp 3.378,93 atau meningkat 9% dari tahun sebelumnya dengan besarnya PDRB sebesar Rp 3.197,07 milyar rupiah. Tahun 2014 PDRB Kota Barito Selatan memberikan sumbangan yang terbesar dalam pembentukan PDRB disusul secara berturut-turut sektor pertambangan dan sektor perdagangan sebesar 9,73% dan PDRB Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1  
PDRB Kabupaten Barito Selatan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (dalam Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	597,3	615,3	637,3	665,3
2.	Pertambangan & Energi	809,3	852,3	906,3	897,7
3.	Industri Pengolahan	185,3	191,3	198,3	212,3
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,1	1,1	1,3	1,6
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bunkar	3,9	4,0	4,2	4,6
6.	Konstruksi	169,3	181,3	198,3	214,3
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Kendaraan Bermotor	220,3	235,3	247,3	265,3
8.	Transportasi dan Pergudangan	303,3	321,3	341,3	375,3
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	46,3	50,3	55,3	60,3
10.	Informasi dan Komunikasi	37,8	41,2	45,0	48,4
11.	Jasa Keuangan dan Real Estate	120,1	126,0	139,1	147,3
12.	Real Estate	59,4	64,0	68,1	73,3
13.	Jasa Perusahaan	0,4	0,5	0,3	0,5
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Sosial Wajib	176,3	186,3	197,3	213,3
15.	Jasa Pendidikan	180,3	189,3	195,3	218,3
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	70,8	75,3	80,3	89,3
17.	Jasa Lainnya	55,8	59,6	62,5	67,0
	PDRB	3.038,3	3.197,3	3.378,3	3.556,3

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan

\* : Angka sementara

\*\* : Angka untuk tahun 2015 dan 2016

Pertumbuhan ekonomi regional sangat erat-masih sangat erat de yang embentuknya. Hal ini berkaitan erat dengan sektor bysing berpotensi besar sektor sakti gmasih dapat lpehant dan lebih un dijadikan prioritas pengembangan sehingga diharapkan dapat n peranan lebih besar dimasa mendatang. Pertumbuhan ekono diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, keejr pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan mengusahakan adanya pergeseran sektor ke sektor skund tersjesehingga tercipta pendapatan masyarakat dengan tingkat pemerataan sebaik mungkin.

Tab 2.122  
Distribusi Per PDRB Kabupaten Barito Selatan  
Menurut Kelompok Sektor 2009

No	Tahun	PDRB Barito Selatan		
		Primer	Sekunde	Tersier
1	2	3	4	5
1.	2009	33.60	15.55	50.84
2.	2010	32.39	16.05	51.56
3.	2011	31.22	15.90	52.88
4.	2012	29.76	16.13	54.11
5.	2013*	28,01	16,70	55,29
6.	2014			
7.	2015			

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan

\* : Angka sementara

\*\* : Angka untuk tahun 2014 dan 2015

## 2. Laju Pertumbuhan PDRB

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Barito Selatan dari tahun positif yang cukup signifikan. Berdasarkan data laju pertumbuhan Bruto Kabupaten Barito Selatan sejak tahun 2001 menunjukkan terjadi pertumbuhan PDRB 0,57% pada tahun 2001 dan 163,4% Meskipun apabila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan tingkat laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Barito Selatan dibawah provinsi. laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada tabel 2.123 ini :



Tabel 2.23  
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buntok dan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Kalimantan Tengah

Tahun	PDRB Kabupaten Barito Selatan				PDRB Kaltan
	Primer	Sekund	Tersier	PDRB	
2001	0,9	3,0	-0,4	0,5	2,9
2002	1,1	-14,2	6,0	1,3	5,3
2003	2,8	5,9	2,0	2,8	4,9
2004	3,2	7,6	3,3	3,7	5,5
2005	4,0	7,9	5,3	5,0	5,9
2006	3,9	8,8	6,0	5,5	5,8
2007	4,3	7,8	6,5	5,8	6,0
2008	2,7	9,4	7,6	5,8	6,1
2009	2,8	6,2	7,3	5,4	5,5
2010	3,1	7,0	8,1	5,9	6,4
2011	2,8	5,1	8,6	5,9	6,7
2012*)	3,8	6,3	7,7	6,1	6,6
2013**)	3,5	8,8	7,8	6,4	7,3

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan  
 \* : Angka sementara  
 \*\* : Angka untuk tahun 2014 dan 2015

### 3. Laju Inflasi Tahun 2014

Laju inflasi merupakan angka kenaikan harga umum menerus dalam periode tertentu, sedangkan deflasi menunjukkan barang dan jasa secara umum. Angka Inflasi/Deflasi dapat dihitung berdasarkan harga konsumen dua bulan yang berurutan. Angka inflasi yang dihitung setiap bulannya diakomodasikan hingga bulan Desember 2014 untuk menghasilkan angka inflasi Kota Buntok 2014. Selain angka inflasi kumulatif terdapat juga angka inflasi yang diperoleh dari perbandingan indeks harga pada tahun yang berbeda.

Selama tahun 2014, Kota Buntok mengalami inflasi kumulatif Kota Buntok tahun 2014 adalah 6,21 %, artinya telah terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang diwakili oleh 285 macam komoditas di Kota Buntok pada tahun 2014 sebesar 6,21% dibandingkan dengan tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu tersebut harga secara umum sebesar 6,21% lebih tinggi. Beberapa hal yang menarik selama tahun 2014 adalah (1) kenaikan harga barang dan jasa pada awal tahun, masa puasa dan Hari Raya Idul Fitri, (2) kenaikan tarif dasar listrik (3) kenaikan harga minyak jenis Bensin dan Solar pada tanggal 18 November 2014 yang tinggi pada Bulan November dan Desember 2014 (4) Upaya

Barito Selatan untuk menanggulangi dampak inflasi dengan membiayai program pemberantasan buta huruf, Inflasi Daerah dan pengadaan pasar penyeimbang.

### 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

#### 1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin. Angka Melek Huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, daerah-daerah dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak tamat menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah untuk menerima informasi dan tertulis. Sehingga angka tersebut menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi dan tertulis. Sehingga angka tersebut berdasarkan kabupaten menunjukkan kontribusi terhadap angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan penduduk usia 15 tahun ke atas dikalikan dengan seratus.

Tab 2.124  
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun  
Kabupaten Barito Selatan

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Melek Huruf	98,6	98,2	99,6	99,1	

Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan ([www.baritoselatan.go.id](http://www.baritoselatan.go.id))

#### 2. Angka Rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah adalah sebuah angka yang menyatakan lamanya seseorang dari masuk sekolah dasar sampai tamat (Setelah tamat). Angka rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menerima pendidikan formal yang pernah dijamah di sekolah merupakan ukuran investasi pendidikan individu.

Setiap tahunnya diharapkan akan membantu meningkatkan rata lama bersikola di dalam ukuran akumulasi modal manusia di suatu daerah.

### 2.1.2.3 Fokus Seni dan Budaya

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait dengan manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu : (1) untuk mewujudkan

berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta berdaya saing untuk mencapai cita-cita dan kesejahteraan.

Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga indikator sebagai berikut:

- a. Jumlah grup kesenian adalah jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk
  - b. Jumlah gedung kesenian adalah jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.
  - c. Jumlah klub olahraga adalah jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk
  - d. Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
- Selanjutnya penyajian pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga adalah sebagai berikut:

Tab 2.125  
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 s.d. 2015  
Kabupaten Barito Selatan

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk	-	0,00	0,00	0,00	-
2	Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 penduduk	-	-	-	-	-
3	Jumlah Klub Olahraga per 10.000 penduduk	-	-	-	4.16	4.03
4	Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 penduduk	-	-	-	54.6	52.4

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bars

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

##### 1. Urusan Pendidikan

###### a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah adalah perbandingan antara jumlah SD dan Madrasah Ibtidayah, dan SMP/MTs, dengan jumlah penduduk kelurahan/ desa untuk SD/MI, atau jumlah penduduk untuk SMP/MTs.

Berdasarkan data perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Barito Selatan mulai tahun 2011 dengan tahun 2015 menunjukkan bahwa kelompok SD/MI, jumlah murid yang bersekolah adalah sebanyak 16.556 pada tahun 2012 dan 16.829 pada tahun 2014. Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2012 adalah sebanyak 16.780 dan pada tahun 2014 adalah sebanyak 16.780. Demikian maka Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Barito Selatan adalah sebesar 98,17 % pada tahun 2012 dan sebesar 99,70 % pada tahun 2014. Sedangkan untuk kelompok SMP/MTs, jumlah murid yang bersekolah adalah sebanyak 7.266 pada tahun 2012 dan 7.301 pada tahun 2014. Jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut adalah sebesar 7.301 pada tahun 2012 dan 7.301 pada tahun 2014.

dan 7.959 pada tahun 2014. Dengan demikian maka Angka  
Kabupaten Barito Selatan untuk Kelompok SD/MI adalah sebesar  
dan sebesar 91,73% pada tahun 2014.

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten E  
dilihat pada 2.2016 dibawah ini :

Tabel 2.26  
Perkembangan Angka Partisipasi Seko  
Tahun 2011 s.d 2015  
Kabupaten Barito Selatan

No	Jenjang Pendid	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD / MI					
1.1	Jumlah Murid 2Usia	16.9	18.6	18.4	17.6	16.86
1.2	Jumlah Penduduk kelompok usia 7 tahun	14.4	15.9	15.7	10.9	11.86
1.3	APS SD/MI	117,	116,	116,	160,	13319
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Murid 15 stah	5.16	6.83	6.85	6.33	6.175
2.2	Jumlah Penduduk Kel usia-15 tahun	5.37	7.19	7.17	5375	7.685
2.3	APS SMP/MTs	95,9	94,9	95,6	91,7	99,0

Sumber Data: Dikbud Kab. Barsel dan SIPD Bappeda

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Tab2127  
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk  
Tahun 2011 s.d 2015  
Kabupaten Barito Selatan

No	Jenjang Pendid	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD / MI					
1.1	Jumlah Gedung Se	19	19	19	19	17
1.2	Jlh Penduduk Kelo 12 tahun	14.4	15.9	15.7	10.9	11.86
1.3	Rasio	73,9	82,0	80,9	55,9	61,6
2	SMP / MTs					
2.1	Jumlah Gedung Se	73	73	73	75	61
2.2	Jlh Penduduk Kelo 1315 tahun	5.37	7.19	7.17	5.37	7.68
2.3	Rasio	73,6	98,5	98,2	71,6	82,1

Sumber Data: Dikbud Kab. Barsel dan SIPD Bappeda

c. Rasio Guru/Murid

Tabel 2.28  
Jumlah Rasio Guru dan Murid Jenjar  
Tahun 2011 s.d 2015  
Kabupaten Barito Selatan

No	Jenjang Pendi	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	1.77	1.77	1.47	1.381	1.84
1.2	Jumlah Murid	19.1	18.6	18.42	17.63	16.8
1.3	Rasio	10,7	12,6	12,4	12,77	11,1
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	669	670	670	424	696
2.2	Jumlah Murid	6.73	6.83	6.85	7.489	6.17
2.3	Rasio	10,7	10,2	10,2	17,66	11,1

Sumber Data: Dinas Dikbud Kab. Barsel dan SIPD Bappeda Kab. Barsel ta

2. Urusan Kesehatan

Capaian kinerja layanan umum dalam urusan kesehatan diukur Posyandu per 10.000 penduduk, Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Rumah Sakit per Satuan Penduduk, Rasio Dokter per Satuan Penduduk, Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil persalin oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidan UCI, Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan, Cakupan penderita penyakit TBC/ BTA, Cakupan penanganan penyakit BDB, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat, Meningkatkan cakupan rawat jalan Puskesmas, dan Men Puskesmas.

Tabel 2.29  
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Barito Selatan - 2011-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio Posyandu per 10.000	82	82	82	80	80
2.	Rasio Puskesmas, Pustu per 10.000 penduduk	6,	6,	5,4	5,	10
3.	Rasio Rumah Sakit per 10.000 Penduduk	4	4	4	4	4
4.	Rasio Dokter per 10.000 Penduduk	23	23	29,	29,	16,
5.	Rasio Tenaga Medis per 10.000 Penduduk	25	25	26	287	26
6.	Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan memiliki kompetensi ke	81,6	84,6	88,8	90,4	90,5
7.	Cakupan desa kelura	58,1	96,8	73,4%	85%	92%

8.	Cakupan Balita G mendapat perawatan	-	100	100	100	100
9.	Cakupan penemuan penanganan pender TBC BTA	54,7%	79,7%	84,7%	49,0%	74%
10.	Cakupan penemuan penanganan pender BDB	Tid ad Kas	Tid Ad Kas	Tid Ad Kas	100	100
11.	Cakupan pelayanan rujukan pasien masy	3	4,6%	13,2%	98,0%	13,4
12.	Cakupan k gumj ubayi	80,5	80,10%	83,8%	83%	77%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan

### 3. Urusan Pekerjaan Umum

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pekerjaan  
indikator kinerja antara lain: g  
no p  
dan Bah  
angk  
dadi  
si baik, R  
Irigasi, Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk, Persentase  
Tempat Pemakaman umum per Satuan Penduduk, Rasio Tempat  
Satuan Penduduk, Rasio R  
umina, Rasio Pemukiman Layak Huni, Pa  
roda empat, Jalan penghubung kabupaten dari ibu ko  
pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4, Panjang jalan k  
panjang jagam  
yaindiki trotoar dan drainase / saluran pembuangan

Tabel 2.30  
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bari  
Tahun 2012-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Proporsi Panjang J dalam k en Baik	-	44,2	54,4	60,5	54,7
2.	Rasio Jaringan Iriga	-	-	11970	11970	11.9
3.	Persentase rumah bersanitasi	-	-	-	10.1	28,1

Sumber: Dinas Kabupaten Barito Selatan

### 4. Perumahan

Capaian kinerja layanan umum Perumahan diukur dengan indikator  
pengguna air bersih, Rumah tangga pengguna listrik, Rumah  
pemukiman kumuh dan Rumah layak huni.

Tabel 2.31.  
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kabupaten Barito Selatan.

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rumah tangga per bersih (%)	-	-	-	8.95 KK	-
2.	Rumah tangga peng	-	-	-	11.1 KK	-
3.	Rumah tangga bersa	-	-	-	63 %	-
4.	Rumah layak huni (	-	-	-	337.2 Unit	33.7 unit

Sumber: Dinas Perumahan, Kebersihan dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan

#### 5. Urusan Penataan Ruang

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Tata Ruang Rasio ruang terbuka Hijau Wilayah Satuan HPL/HGB dan RMB per satuan bangunan.

Tabel 2.32  
Capaian Kinerja Urusan Tata Ruang Kabupaten Barito Selatan

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio ruang terbuka Satuan Luas Wilayah HPL/HGB (%)	-	-	-	100 %	-
2.	Rasio bangunan RMB per satuan bangunan (%)	-	-	-	70 %	-

Sumber: Dinas Perumahan, Kebersihan dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan

#### 6. Urusan Perencanaan Pembangunan,

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perencanaan Pembangunan indikator: Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah: yakk telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan RPJMD kedalam RKPD.

Tabel 2.33  
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten  
Tahun 2012-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RP, telah ditetapkan Perda	1	1	1	1	1
2.	Tersedianya Perencanaan RP, telah ditetapkan Perda/Perkada	1	1	1	1	1
3.	Tersedianya Perencanaan : R telah ditetapkan Perkada	1	1	1	1	1
4.	Penjabaran Progr kedalam RKPD	1	1	1	1	1

Sumber: Bappeda Kabupaten Barito Selatan

#### 7. Urusan Perhubungan,

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perhubungan diukur penumpang angkutan umum, trayek, Jumlah uji kir angkut Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis, Angkutan Darat, Kepemil penguujian kelayakan angkutan umum (KIR) dan Biaya Peng

Tabel 2.34  
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Barito  
Tahun 2012-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Arus penumpang umum (%)	24.4	21.0	13.5	11.2	17.3
2.	Rasio Ijin trayek( %	-	-	-	-	-
3.	Jumlah ujikir angkutan umum (kali)	21	42	42	43	45
4.	Jumlah Pelabuhan Terminal (Terminal K Terminal Sanggu )	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2

Sumber: Dishubkominfo Kab. Barsel



## 8. Urusan Lingkungan Hidup

Capaian kinerja layanan umum pada urusan lingkungan hidup diukur dengan Persentase penanganan sampah, Persentase penduduk bera pemukiman yang tertata, Pencemaran status mutu air, Cak longsor dan sumber, Cakupan pengawasan terhadap pelaksana pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dan Penegakan

Tabel 2.35  
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito  
Tahun 2011-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase penangan	72,87	64,06	58,7 %	52,32	75,9
2.	Pengelolaan kualiti penetapan kelas air	20	20	23	26,7	40,9
3.	Cakupan pengawasan pelaksanaan amdal	80	80	90	95	90,9
4.	Tempat pembuangan (TPS) per satuan penduduk	11,02	10,02	09,8 %	09,02	10,9
5.	Penegakan hukum lingkungan	80	80	90	100	100

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan

## 9. Urusan Pertanahan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan pertanahan diukur dengan Persentase luas lahan bersertifikat, Penyelesaian kasus tanah lokasi.

Tabel 2.36  
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan  
Tahun 2011-2015

No	Indikator	TAHUN			
		2011	2012	2013	2014
1.	Persentase luas lahan bersertifikat	1,109	1,116	1,152	1,166 %
2.	Penyelesaian kasus tanah lokasi	5	1	10	8
3.	Penyelesaian izin lokasi	9	0	0	0

Sumber: Badan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan

## 10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diukur dengan indikator persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan.

memiliki Akta Perceraian, persentase kepemilikan Akta Pengakuan, Pendaftaran dan Pengesahan Anak dan Kepemilikan KTP.

Tabel 2.37  
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Capil Kabupaten  
Tahun 2012-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	% kepemilikan KTP	30,5	46,5	54,9	54,9	76,2
2.	Kepemilikan Akta Kela	10.9	12.8	16.4	20.5	33.6
2.	kepemilikan akta kela penduduk	106,	116,	133,	163,	258,

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Selatan

#### 11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Anak diukur dengan indikator: Persentase partisipasi perempuan di lembaga KDRT, Persentase jumlah terdampak di bawah umur, Partisipasi angkatan kerja perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

Tabel 2.38  
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	70,4	91,7	92,0	88,4	91,5
2.	Rasio KDRT	0,011	0,000	0,002	0,002	0,000
3.	Persentase jumlah terdampak di bawah umur	0,0	0,0	0,0	0,0	0
4.	Penyelesaian perkara perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan	100,	0,0	100,	100,	10

Sumber: BPSAKB Kabupaten Barito Selatan

#### 12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Keluarga Berencana diukur dengan indikator: jumlah anak per keluarga, rasio anak per keluarga, Cakupan peserta KB, dan Status dan Rata-rata Keluarga Sejahtera

Tabel 2.39  
Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarg  
Kabupaten Barito Selatan 2011-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rata-rata jumlah anak p	2,5	2,3	2,1	2,1	2,1
2.	Rasio akseptor KB	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7
3.	Cakupan peserta KB ak	77,6	84,4	88,1	81,0	75,4
4.	Keluarga Pra Sejahter Sejahtera I	18,0	16,1	15,4	15,4	15,4

Sumber: BPSAKB Kabupaten Barito Selatan

### 13 Urusan Sosial

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Sosial diukur dengan panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, PMKS yang Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Tabel 2.40  
Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Barito Sela  
Tahun 2011-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sarana sosial seperti panti jompo dan panti	2	2	2	2	3
2.	PMKS yang mempero sosial	2.01	1.06	16.34	685	371
3.	Penanganan penyand kesejahteraan sosial	2.01	1.06	16.34	685	371

Sumber: Dinas Sosial dan Bekerjasama Kar.

### 14 Urusan Ketenagakerjaan

Capaian kinerja layanan umum ketenagakerjaan diukur dengan Angka partisipasi angkatan kerja, Angka sengketa pengusaha yang ditempatkan, Tingkat pengangguran terbuka, Keseluruhan Perselisihan buruh dan pengusaha di pemerintah daerah.

Tabel 2.41  
 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Bari  
 Tahun 2011-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka partisipasi angk	-	-	-	-	69,99
2.	Angka Angkatan Kerja	-	-	-	-	64.5
3.	Angka Kesempatan Ker	-	-	-	-	-
4.	Pengangguran	-	-	2,17	-	3,77
5.	Angka sengketa peng per tahun	-	-	-	-	-
6.	Pencari kerja yang dite	13 Oran	27 Oran	63 Oran	30 Oran	-
7.	Tingkat pengangguran	-	-	-	-	-
8.	Keselamatan dan perli	-	-	1 kas	2 kas	-
9.	Perselisihan buruh d tehadap kebijakan pem	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Sosial dan Bekerja Sosial Kab.

#### 15 Urusan Koperasi dan UKM

Capaian kinerja umum pada urusan Kopersai dan UKM  
 Persentase koperasi aktif, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengal

Tabel 2.22.  
 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Bari  
 Tahun 2011-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase koperasi	84	86	87	88	88
2.	Usaha mikro dan kec	2.0 Un	2.0 Un	2.5 Un	2.7 Un	2.7 un

Sumber: Disperindagkop dan UKM Kabupaten Barito Selatan

#### 16 Urusan Penanaman Modal

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Penanaman M  
 Lama proses perizinan dan Jumlah Perda yang mendukung iklim

Tabel 2.43  
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Barito  
Tahun 2011-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Lama proses perizinan	3 Ha	3 Ha	3 Ha	3 Ha	3 Ha
2.	Jumlah Perda yang iklim usaha	4 Per	4 Per	4 Per	4 Per	4 Per

Sumber: Bappeda Pelayanan Perizinan dan Korpri, Kantor Bani dan Monev

#### 17 Urusan Kebudayaan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni budaya, Jumlah sarana per dan Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya.

Tabel 2.44  
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Barito  
Tahun 2011-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penyelenggaraan festival budaya	-	-	4	4	9
2.	Jumlah sarana pen seni budaya	-	-	4	4	4
3.	Jumlah Benda, Kawasan Cagar B dilestarikan	-	-	8	8	8

Sumber: Bidang Kebudayaan Disdikbud Kab. Barsei

#### 18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kepemudaan indikator: Jumlah organisasi pemuda, Jumlah organisasi kepemudaan, Jumlah kegiatan olahraga, Gelanggang/ bala dan lapangan olahraga .

Tabel 2.45  
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Barito Tahun 2011-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Klub Olah R	-	-	-	31	32
2.	Jumlah Gedung Olah	-	-	-	24	25
3.	Jumlah Organisasi P	-	-	-	16	19
4.	Jumlah Organisasi C	-	-	-	21	22
5.	Jumlah Kegiatan Ke	-	-	-	6	6
6.	Jumlah Kegiatan Ola	-	-	-	15	20

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Barsei

## 19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kesatuan Bangsa diukur dengan indikator: Jumlah tenaga pengendalian lingkungan di desa/ kelurahan dan Jumlah bangunan pos jaga/ r

Tabel 2.46  
Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Da  
Kabupaten Barito Selatan 2015 T

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Kegiatan politik daerah	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Kegiatan n terhadap LSM, Orma	1	1	1	1	1

Sumber: Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Selatan 2016

## 20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian indikator: Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 Jumlah 10.000 penduduk, Perbaikan unjuk rasa, Jumlah/ fre pengamanan dalam setahun, Kemiskinan dan Sistem informasi administrasi pemerintahan, dan Penegakkan Perda.

Tabel 2.47  
Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persand

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000	7	7	7	7	7
2.	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	12	12	12	12	12
3.	Frekwensi per unjuk rasa	2	1	2	2	3
4.	Jumlah / fre kegiatan peng dalam setahun	4	4	6	7	7
5.	Kemiskinan	7,5	7,2	6,2	6,1	6,1
6.	Sistem informasi perijinan dan a pemerintah	1	1	1	1	1
7.	Penegakkan Perd	1	1	1	1	2

Sumber: Bappeda Kabupaten Barito Selatan

## 21 Urusan Ketahanan Pangan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Ketahanan P  
Regulasi ketahanan pangan dan Ketersediaan pangan utama.

Tabel 4.2  
Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Ba  
Tahun 2011-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Menguatnya Cad 60%	10,7	15	15	16	57,9
2.	Ketersediaan pa utama	0	18.393	19.264	22.148	22.1
3.	Tersedianya info pasokan harga d pangan 90% utk desa/Kel	8,3	18	44	47	68
4.	Tertanganinya d rawan pangan 60	4,	10	0	0	44
5.	Stabilnya harga	15	14,	14,	12,8	13,
6.	Stabilnya Pasok	10	9,	11,5	12,8	8,
7.	Terpenuhinya keter Energi dan Prote perkapita	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145
8.	Terpenuhinya ke Energi dan Prote perkapita 2.041,5 kkal/hr, gr/hr	0	0	0	0	0
9.	Tercapainya sko	83,	84,9	88,	88,	89,
10	Terawasinya dan terbinanya keam pangan	21,	37	29	69	85
11	Jumlah pengemb DEMAPAN	48	59	14	14	14
12	Regulasi Ketaha (PERBUP)	1	1	1	1	1
13	Berkembangnya penyuluhan	65	70	48	62,2	96
14	Tersusunnya renc PP	50	50	70	78,7	96
15	Terdeseminasinya Informasi teknol pertanian	13	30	44,	51,7	85
16	Tersusunnya peta komoditas ungu	0	0	0	0	0
17	Tersusun dan terlaksananya p penyuluhan	50	60	70	78,8	90

Sumber: Rencana SKPD BOKIP 2011

## 22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Masyarakat diukur dengan indikator rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK.

Tabel 2.4  
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	-	-	-	-	-
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	-	-	-	-	-

## 23 Urusan Statistik

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Statistik diukur dengan indikator dalam angka dan Buku PDRB Kabupaten.

Tabel 2.50  
Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Buku Kabupaten dan Kecamatan	1	1	1	1	1
2.	Buku PDRB Kabupaten	1	1	1	1	1

Sumber: Bappenda Kabupaten Barito Selatan

## 23 Kearsipan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kearsipan diukur dengan indikator Pengelolaan arsip secara buku dan Rasio jumlah pengunjung per pustaka.

Tabel 2.51  
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pengelolaan arsip buku	6	7	8	8	8
2.	Rasio jumlah pengunjung per pustaka	5.159	5.085	3.428	7.358	4.934

Sumber: Bappenda Kabupaten Barito Selatan 2016



## 24 Urusan Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja layanan umum pada infrastruktur komunikasi dan indikator: Jumlah jaringan komunikasi, jumlah wartel/ warne surat kabar nasional/ lokal, Jumlah penyiaran radio/ TV lokal Daerah dan Pameran/ Expo.

Tabel 2.52  
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tahun 2011-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah jaringan komunikasi	2	2	3	3	3
2.	Jumlah wartel/ warne terhadap penduduk	-	-	-	-	-
3.	Jumlah surat kabar nasional/ lokal	3	4	5	5	5
4.	Jumlah penyiaran radio/ TV lokal	20	20	21	23	20
5.	Website milik pemerintah daerah	1	1	1	1	1
6.	Pameran/Expo	2	2	2	2	2

Sumber: BPS Kabupaten Bantul Tahun 2016

## 25 Urusan Perpustakaan

Capaian kinerja utama pada urusan Perpustakaan diukur dari Meningkatnya jumlah tenaga perpustakaan, Meningkatnya jumlah Perpustakaan Desa dan Kelurahan yang cerdas.

Tabel 2.53  
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah tenaga perpustakaan	6	7	8	8	8
2.	Jumlah pengelola perpustakaan	3	3	3	3	3
3.	Jumlah Desa dan Kelurahan yang cerdas	-	-	Kel 3 Desa	Kel 3 Desa	Kel 3 Desa

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2015

### 2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan di kabuꝑ terhadap indikator kinerja penyelenggara pameurutsahrapididarah, y bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mi perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

#### 1. Urusan Pertanian

Capaian kinerja layanan umum pada dengan iPeriktandianKand Sektor Peternakan terhadap PDRB (%), Produktivitas Padi ton/

Tabel 2.54  
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Barito Se  
Tahun2012015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kontribusi Sektor terhadap PDRB (%)	-	-	-	-	-
2.	Produktivitas (Ton/Ha)	1.142	2.871	533,9	2.075	3.802
3.	Produktivitas (Ton/Ha)	4,07	5,42	1,78	3,32	-

Sumber: Dinas Kabupaten Barito Selatan 6 tahun 201

#### 2. Urusan Kehutanan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kehutanan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Kerusakan kawasan hutan.

Tabel 2.55  
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Barito S  
Tahun2012015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rehabilitasi Hutan	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74
2.	Kerusakan kawasa	24,71	23,44	23,44	23,44	25,17
3.	Kawasan Hutan Te oleh Institusi per Tingkatpak (unit)	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kabupaten Barito Selatan 6 tahun 201

#### 3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Energi Sumb indikator: Persentase pertambangan tanpa ijin, dan persentase kon terhadap PDRB.

Tabel 2.56  
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mine  
Kabupaten Barito Selatan 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	% Pertambangan tanpa izin	-	-	-	-	-
2.	% Kontribusi pertambangan terhadap PDRB	15.77	18.90	22.90	22.58	18.94
3.	% Energi Listrik dan Terbarukan	76%	79%	80.54	81.30	89,25

Sumber: Dinas Pertambangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015

#### 4. Urusan Pariwisata

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pariwisata di wisatawan, dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

Tabel 2.57  
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan  
Tahun 2012-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kunjungan wisatawan	12.81	8.507	7.931	6.91	7.759
2.	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	40,6 %	71,85	58,94	62,93	60,12

Sumber: Data BPS Kabupaten Barito Selatan 2015

#### 5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perikanan dan Kelautan Jumlah produksi perikanan, Persentase pencapaian komsumsi ikan.

Tabel 2.58  
Capaian Kinerja Perikanan dan Kelautan Kabupaten Barito Selatan  
Tahun 2012-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah produksi perikanan	9.750	13.517	12.133	14.231	14.427
2.	% Capaian target	77,7	82,4	108,	103,	103,48
3.	Jumlah rata-rata konsumsi ikan	31,4	32,5	33,6	38,6	39,8

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan tahun 2016

## 6. Urusan Perdagangan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perdagangan produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor dan pedagang/ usaha informasi.

Tabel 2.59  
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Barito  
Tahun 2012-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	% Kontribusi Perdagangan terhadap PDR	25,1	30,3	31,9	33,7	34,2
2.	Ekspor Perdagangan	44.063	36.964	43.429	40.261	39.759

Sumber: analisa data BPS Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016.

## 7. Urusan Perindustrian

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perindustrian diukur dengan produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor, dan Cakupan bina kelompok pengrajin.

Tabel 2.60  
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Barito Selatan  
Tahun 2011-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	% Kontribusi Industri terhadap PDR	-	-	-	-	-
2.	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan	115 IK	124 IK	130 IK	146 IK	184 IK

Sumber: analisa data BPS Kabupaten Barito Selatan 2015

## 8. Urusan Transmigrasi

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Transmigrasi diukur dengan Transmigrasi swakarsa, dan Kontribusi transmigrasi terhadap PDR

Tabel 2.61  
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan  
Tahun 2011-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Transmigrasi swakarsa	-	-	-	-	-
2.	Kontribusi transmigrasi terhadap PDR	-	-	-	-	-

## 2.1.4 Aspek Daya Saing

Daya saing daerah adalah kemampuan daerah perkotaan untuk meningkatkan pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi tetap bertumbuh bersaing dengan provinsi dan kabupaten/ kota lainnya y internasional.

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

### 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah ditunjukkan oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRT) per kapita. Menurut Kelompok Pengeluaran Rata-Rata Perkapita sebulan Me Kelompok Bukan Makanan

Tabel 2.62  
Kemampuan Ekonomi Daerah Kab. Barito Selatan  
Tahun 2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pengeluaran Rata-Rata Perkapita sebulan Menuut Kelompok Makanan	-	-	-	-	Rp 408.
2.	Pengeluaran Rata-Rata Perkapita sebulan Menuut Kelompok Bukan Makanan	-	-	-	-	Rp 330.

Sumber: Barito Selatan Dalam Angka 2016

### 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Capaian kinerja indikator fasilitas infrastruktur 2014-2016 ditunjukkan oleh :1) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. 2) jumlah barang/ orang/barang terangkut dalam terminal/ pelabuhan.

Tabel 2.63  
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kab. Barito Selatan Tahun 201

No	Indikator	2014	2015	2016
1.	Rasio Panjang Jalan per Kendaraan	-	-	-
2.	Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum	-	-	-
3.	Jumlah Org/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal per Tahun	-	314	314

Sumber: SIPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016

### 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Capaian kinerja fokus iklim berinvestasi ditunjukkan oleh: 1) demonstrasi, 3) Lama Proses Perijinan, dan 4) Persentase desa b

Tabel 2.64  
Fokus Iklim Berinvestasi Daerah Kab. Barito Selatan  
Tahun 20-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka kriminalitas	-	-	-	-	-
2.	Jumlah demo	-	-	-	-	-
3.	Lama Proses Perij	3 ha	3 ha	3 ha	3 ha	3 ha
4.	Persentase desa swasembada	-	-	-	-	-

Sumber: Bappeda Kabupaten Barito Selatan tahun 2016

### 2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Fokus Sumber Daya Manusia diukur dengan IKK: Rasio Keterg S2, dan S terhadap total penduduk.

Tabel 2.165  
Fokus sumberdaya Manusia Kab. Barito Selatan  
Tahun 20-2006

No	Indikator	2004	2005	2006
1.	Rasio Ketergantungan	-	-	-
2.	Rasio lulusan S1 S terhadap total penduduk	1:46	1:35	1:37

Sumber: Bappeda Kabupaten Barito Selatan tahun 201

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Ta RPJMD

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap ex pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang diinginkan dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan diperoleh dari hasil analisis gambaran umum daerah daerah.

Potensi permasalahan pembangunan daerah timbul dari keku belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang peluang dan meminimalisasi hambatan. Untuk mengefekt pembangunan daerah daerah ini bisa dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, dihadapi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini berkaitan dengan permasalahan yang terkait dengan kewenangan yang bertanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tidak semua permasalahan tiap urusan dijadikan sasaran tahun ke depan, mengingat keterbatasan pendanaan, isu strategis, agenda paling strategis, dan hubungan dengan agenda yang berhasil dicapai di periode sebelumnya. Dengan pendekatan permasalahan pada urusan atau gabungan urusan yang menjadi sasaran pokok adalah permasalahan yang memiliki dampak paling signifikan terhadap pembangunan dan kriteria lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan pada tiap permasalahan juga dilakukan identifikasi faktor-faktor penyebabnya.

Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor-faktor yang lain yang memiliki pengaruh signifikan dalam memecahkan permasalahan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah. Kriteria capaian kinerja:

Tabel 2.66  
Kriteria Capaian Kinerja

Sangat Baik	Target tercapai (>100%)
Baik	Mendekati target (>75%)
Cukup	Dibawah Target (50%)
Rendah	Jauh dibawah target (<0%)

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan kinerja pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah guna mendapatkan rumusan permasalahan tersebut, sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.67

Tabel 2.67  
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah  
Tahun 2011-2015

No	Aspek/Fokus/Urut Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN					Standar	Interaksi
		2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
1	Fokus Kesejahteraan Masyarakat Ekonomi							
1.1	PDRB Adag Berlaku	Dalam milyar rupiah						
1.1.1	Pertanian, kehutanan, perikanan		697,	762,	844,	918,		
1.1.2	Pertambangan dan penggalian		936,	987,	918,	842,		
1.1.3	Industri pengolahan		206,	217,9	249,	291,		
1.1.4	Pengadaan listrik		0,9	1,0	1,17	1,91		
1.1.5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Ulang		4,2	4,4	5,1	6,1		
1.1.6	Konstruksi		184,	204,	241,	283,		
1.1.7	Perdagangan besar, eceran, reparasi mobil, sepeda motor		241,	261,	297,	336,		
1.1.8	Transportasi dan pergudangan		316,	355,	397,	484,4		
1.1.9	Penyediaan akomodasi, makan, minum		53,4	63,8	73,2	86,7		
1.1.10	Informasi dan komunikasi		38,6	41,7	48,7	54,7		
1.1.11	Jasa keuangan dan asuransi		137,	156,	194,	204,		
1.1.12	Real estate		66,6	74,4	87,5	101,		
1.1.13	Jasa perusahaan		0,5	0,5	0,6	0,7		
1.1.14	Administrasi pemerintahan dan jasa		204,	234,	267,4	300,		
1.1.15	Jasa pendidikan		210,	236,	258,	320,		
1.1.16	Jasa kesehatan dan sosial		77,6	84,8	97,2	117,		
1.1.17	Jasa lainnya		63,4	73,8	83,8	95,5		
	Total		3.439	3.761	4.068	4.448		
1.1	PDRAD Harga Konstan	Dalam milyar rupiah						
1.1.1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan		597,	615,	637,			
1.1.2	Pertambangan dan penggalian		809,	852,	906,			
1.1.3	Industri pengolahan		185,	191,	198,			



1.1.4	Pengadaan hi			1,1	1,1	1,3			
1.1.5	Pengadaan A Pengelolaan Limbah dan D Ulang			3,9	4,0	4,2			
1.1.6	Konstruksi			169,	181,	198,			
1.1.7	Perdagangan dan eceran; i mobil dan se motor			220,	235,	247,			
1.1.8	Transportasi d pergudangan			303,	321,	341,			
1.1.9	Penyediaan akomodasi da makan minum			46,1	50,6	55,4			
1.1.10	Informasi dan komunikasi			37,8	41,2	45,0			
1.1.11	Jasa keuang asuransi			120,	126,	139,			
1.1.11	Real estate			59,4	64,0	68,1			
1.1.11	Jasa perusah			477,	503,	529,			
1.1.11	Administrasi pemerintahan pertahanan d jamsos wajib			176,	186,	197,			
1.1.11	Jasa pendidil			180,	189,	195,			
1.1.11	Jasa kesehat keg sosial			708,4	75,3	80,3			
1.1.11	Jasa lainnya			55,8	59,6	62,8			
	Total			3.038	3.197	3.378			
1.2	Pertumbuhan Ekonomi		7,0	5,3	5,2	5,6			
1.3	Laju Inflasi								
1.4	PDRB Perkap								
1.5	Indeks Gini								
1.6	Prosentase PM hsku		7,56	7,25	6,2	6,3			
2	Fokus Kesejahtera								
2.1	Pendidikan								
2.1.1	Angka Melek			98,2	99,1	87,85	99,81		
2.1.2	Angka <del>Rata-rata</del> <del>Melek</del>								
2.1.3	APK SD/MI/P		116,	116,5	116,5	160,	139,		
2.1.4	APK SMP/MI/		94,5	94,6	92,1	139,3	122,		
2.1.5	APK SMA/SMK/MA C		73,2	73,3	73,8	83,5	94,8		
2.1.6	APM SD/MI/P		98,2	98,3	98,3	150,	118,8		
2.1.7	APM SMP/MTs/Pak		91,0	91,4	91,4	117,9	67,2		
2.1.8	APM SMA/SMK/MA		72,0	72,7	72,7	72,9	63,3		
2.1.9	Pendidikan y ditamatkan	SD				2.90	3.30		
		SMF				2.08	2.29		
		SMA				1.37	1.42		

2.2	Kesehatan							
2.2.1	Angka Kematian B	8,2	8	1	0	1,4	"d 5	
2.2.2	Angka Umur Harap	68,2	68,	68,4	-	68,4	71,5	
2.2.3	Peravalensi Balita	0	1	2	1	2	"d 5	
2.2.4	Angka Kesaki Kasar	-	-	-	-	-	-	
2.2.5	Angka Kematian II KH	117	11	390	96	165	"d 24	
2.3	Pertanahan							
2.3.1	Persentase Pendu memiliki Lahan							
2.4	Ketenagakerj							
2.4.1	Rasio Penduduk y							
3	Fokus Seni Budaya Olahraga							
3.1	Kebudayaan							
3.1.1	Jumlah group kes 10.000 pdd		0,00	0,00	0,00	-		
3.1.2	Gedung Kese							
3.2	Kinerja Pemuda di							
3.2.1	Jumlah Klub/Gala Kesenian per 10.0				4.16	4.03		
3.2.2	Jumlah Gedung Ol 10.000				54.6	52.48		
B	Aspek Pelaya Umum							
1	Fokus Layanan Ur							
1.1	Pendidikan							
1.1.1	Angka Partisipasi SD/MI	117,	116,	116,	150,	118,4		
1.1.2	Rasio ketersediaa per penduduk usia SD/MI	73,9	82,0	80,9	55,9	61,6		
1.1.3	Rasio ketersediaa per penduduk usia SMP/MTs	73,6	98,5	98,2	71,6	82,1		
1.1.4	Rasio ketersediaa SMA				67,0	63,1		
1.1.5	Rasio guru: murid				1 :	1 :		
1.1.6	Rasio guru: murid				1 :	1 :		
1.1.7	Rasio guru: murid rata-rata murid SD/MI				1 :	1 :14		
1.1.8	Rasio guru: murid rata-rata murid SMP				1 :	1 :2		
1.1.9	Rasio guru: murid rata-rata murid SMA				1 :	1 :2		

1.2	Kesehatan							
1.2.1	Rasio Posyandu per Balita 10.000	82	82	82	80	80	50	
1.2.2	Rasio Puskesmas, Pustu per 10.000	6,2	6,2	5,4	5,4	10	-	
1.2.3	Rasio Rumah Saki 500.000 Penduduk	4	4	4	4	4	4	
1.2.4	Rasio Dokter per Penduduk	23	23	29,1	16,1	22	40	
1.2.5	Rasio Tenaga Med 100.000 Penduduk	25,1	25,1	26,1	287,1	26,1	23,1	
1.2.6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	81,60	84,60	88,80	90,40	90,50	90%	
1.2.7	Cakupan desa kebidanan	58,10	96,80	73,40	85%	92%	100%	
1.2.8	Cakupan Balita Gizi mendapat perawatan	-	100	100	100	100	100	
1.2.9	Cakupan Penemuan penanganan penderita penyakit TBC BTA	54,1	79,1	84,7	49,0	74	100	
1.2.10	Cakupan Penemuan penanganan penderita penyakit DBD	0	0	0	0	100	100	
1.2.11	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	3%	4,60	13,12	9,80	13,40	100	
1.2.12	Cakupan kunjungan rumah	80,50	80,1	83,80	83%	77%	90%	
1.3	Pekerjaan Umum							
1.3.1	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik		44,1	54,1	60,1	54,7		
1.3.2	Rasio jaringan irigasi			1.1970	1.1970	11.97		
1.3.3	Persentase rumah bersanitasi (%)				1021	28,1		
1.3.4	Total Panjang Jalan			1.013	1.073,5	1.077		
1.4	Perumahan							
1.4.1	Rumah tangga perdesaan bersih (%)				8.950			
1.4.2	Rumah tangga perdesaan listrik				11.117			
1.4.3	Rumah tangga berair minum				63%			
1.4.4	Rumah layak huni (%)				33.77	33.77		
					Unit	unit		
						(89,53		
1.5	Penataan Ruang							
1.5.1	Rasio ruang terbuka persatuan luas wilayah HPL/HGB (%)							
1.5.2	Rasio bangunan bersatu persatuan bangunan							

1.6	Perencanaan Pem Daerah							
1.6.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD telah ditetapkan d Perda	1	1	1	1	1		
1.6.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJM telah ditetapkan d Perda/Perkada	1	1	1	1	1		
1.6.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD ditetapkan dengan	1	1	1	1	1		
1.6.4	Penjabaran Program kedalam RKPD	1	1	1	1	1		
1.7	Urusan Perhubungan							
1.7.1	Arus penumpang a umum (%)	24,32	21,0	13,5	11,2	17,36		
1.7.2	Rasio Ijin Trayek	0	0	0	0	0		
1.7.3	Jumlah uji kir ang umum (kali)	215	420	425	435	450		
1.7.4	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal	1/2	1/2	1/2	1/2	½		
1.8	Lingkungan H							
1.8.1	Persentase penan sampah	72,8	64,0	58,1	52,3	75%		
1.8.2	Pengelolaan kualipenetapan kelas a	20%	20%	23%	26,70	40%		
1.8.3	Cakupan pengawa terhadap pelaksar	80	80	90	95	90%		
1.8.4	Tempat pengbasar (TPS) per satuan	11,0	10,0	9,8	9,0	10%		
1.8.5	Penegakan hukum	80%	80%	90%	100%	100%		
1.9	Urusan Perta							
1.9.1	Persentase luas l bersertifikat	1,10	1,12	1,15	1,17			
1.9.2	Penyelesaian kas negara	5	1	10	8			
1.9.3	Penyelesaian lokal	0	0	1				
1.10	Kependudukan dan Sipil							
1.10.1	% kepemilika	30,50	46,5	54%	54,95	76,28		
1.10.2	Kepemilikan akta	10,9	12,8	16,4	20,5	33,6		
1.10.3	Kepemilikan akta per 1000 penduduk	106,	116,	133,	163,	258,		
1.11	Urusan Pemberday Perempuan dan Perlindungan Ana							
1.11.1	Persentase partis pempuang di lem pemerintah	70,4	91,	92,0	88,4	91,5		
1.11.2	Rasio KDRT	0,011	0	0,002	0,002	0,000		
1.11.3	Persentase jumlah kerja dibawah um	0	0	0	0	0		

1.11.	Penyelesaian penyelesaian perlindungan pere anak diadikakan kek	100	0	100	100	100		
1.12	Urusan Keluarga dan Keluarga Sejahtera							
1.12.	Rata-rata jumlah anak keluarga	2,5	2,3	2,1	2,1	2,1		
1.12.	Rasio akseptor	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7		
1.12.	Cakupan PKI aktif	77,6	84,4	88,1	81,0	75,4		
1.12.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	18,0	16,1	15,4	15,4	15,4		
1.13	Urusan Sosial							
1.13.	Sarana sosial seperti asuhan, panti jomortu, panti rehabilitasi	2	2	2	2			
1.13.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	2.01	1.06	16.3	68			
1.13.	Penanganan penyelesaian masalah kesejahteraan	2.01	1.06	16.3	68			
1.14	Urusan Ketenagakerjaan							
1.14.	Angka partisipasi angkakerja	-	-	-	-			
1.14.	Angka angkatkerja	-	70,6	-				
1.14.	Angka kesemangkerja	-	-	-				
1.14.	Penganggurakerja	-	2,17	-				
1.14.	Angka sengketa ppekerja pertahun	-	-	-	-			
1.14.	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	13 ora	27 ora	63 ora	30 oar			
1.14.	Tingkat penanggug	-	-	-	-			
1.14.	Keselamatan dan perlindungan			1 kas	2 kas			
1.14.	Perselisihan burupengusaha terhadap kebijakan pemerin	-	-	-	-			
1.15	Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil							
1.15.	Persentase koperakerja	84%	86%	87%	88%	88%		
1.15.	Usaha mikro kecil		2.095	2.510	2.704	2.78uni		
1.16	Urusan Penanaman Modal dan Perindustri							
1.16.	Lama proses perizinan		3 Ha	3 Ha	3 Ha			
1.16	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	4 Per	4 Per	4 Per	4 Per			
1.17	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata							
1.17.	Penyelenggaraan budaya	-	-	-	-	9		
1.17.	Jumlah sarana penyelenggaraan budaya	-	-	4	4	4		

1.17.	Jumlah benda, sit kawasan cagar bu dilestarikan	-	-	8	8	8		
1.18.	Urusan Kepemuda Olahraga							
1.18.	Jumlah Klub Raga	-	-	-	315	325		
	Jumlah Gedu Raga	-	-	-	24	25		
1.18.	Jumlah Organisas	-	-	-	16	19		
1.18.	Jumlah Organisas	-	-	-	21	22		
1.18.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	-	-	-	6	6		
1.18.	Jumlah Kegiatan C	-	-	-	15	20		
1.19	Urusan Kesatuan Politik Dalam Neg							
1.19.	Jumlah kegiatan p politik daerah	1	1	1	1			
1.19.	Jumlah kegiatan p terhadap LSM, Or OKP	1	1	1	1			
1.20	Urusan Otomob Pemerintahan Um Administrasi Keua Daerah, Perangka Kepegawaian dan Persandian							
1.20.	Rasio jumlah polis praja per 10.000 p	7	7	7	7	7		
1.20.	Jumlah Linmas pe 10.000 penduduk	12	12	12	12	12		
1.20.	Frekwensi penang rasa	2	1	2	2	3		
1.20.	Jumlah / frekwens pengamanan dalar	4	5	6	7	7		
1.20.	Kemiskinan	7,5	7,2	6,2	6,1	0		
1.20.	Sistem informasi p perijinan dan adm pemerat	1	1	1	1	1		
1.20.	Penegakan Perda	1	1	1	1	2		
1.21	Urusan Ketahanan							
1.21.	Menguatnya Cad. 60%	10,7	15	15	16	57,9		
1.21.	Ketersediaan pang	0	18.393	19.264	22.148	22.1		
1.2.3	Tersedianya infor pasokan harga da pangan 90% utk 9	8,3	18	44	47	68		
1.21.	Tertanganinya dae pangan 60%	4,4	10	0	0	44		
1.21.	Stabilnya harga	15	14,	14,	12,8	13,		
1.21.	Stabilnya Pasokan	10	9,7	11,8	1289	8,8		
1.21.	Terpenuhinya kete Energi dan Protei	13	13	13	13	13		
		145	145	145	145	145		
1.21.	Terpenuhinya kete Energi dan Protei 2.041,5 kkal/hr, d gr/hr	0	0	0	0	0		

1.21.	Tercapainya PPK	83,	84,9	88,	88,	89,		
1.21.	Terawasinya dan keamanan pangan	21,	37	29	69	85		
1.21.	Jumlah pengembalian DEMAPAN	48	59	14	14	14		
1.21.	Regulasi Ketahanan (PERBUP)	1	1	1	1	1		
1.21.	Berkembangnya layanan penyuluhan	65	70	48	62,2	96		
1.21.	Tersusunnya rencana	50	50	70	78,7	96		
1.21.	Terdeseminasinya teknologi pertanian	13	30	44,	51,7	85		
1.21.	Tersusunnya peta komoditas unggulan	0	0	0	0	0		
1.21.	Tersusun dan terlaksana program penyuluhan	50	60	70	78,8	90		
1.22	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa							
1.22.	Rata-rata jumlah kelengkapan binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)							
1.22.	Rata-rata jumlah kelengkapan binaan PKK							
1.23	Urusan Statistik							
1.23.	Buku "Kabupaten Angka"	1	1	1				
1.23.	Buku "PDRB Kabupaten "	1	1	1				
1.24	Urusan Kearsipan							
1.24.	Pengelolaan arsip buku	6	7	8	8	8		
1.24.	Rasio jumlah pengumpulan perpustakaan	5.15	5.08	3.42	7.35	4.93		
1.25	Urusan Komunikasi Informatika							
1.25.	Jumlah jaringan komputer	2	2	3	3			
1.25.	Jumlah wartel/warung terhadap penduduk							
1.25.	Jumlah surat kabarkor nasional/lokal	3	4	5	5			
1.25.	Jumlah penyiar radio	20	20	21	23			
1.25.	Webside milik pemerintah daerah	1	1	1	1			
1.25.	Pameran/Exhibisi	2	2	2	2			
1.26	Urusan Perpustakaan							
1.26.	Jumlah tenaga perpustakaan	6	7	8	8	8		
1.26.	Jumlah pengelola perpustakaan	3	3	3	3	3		
1.26.	Jumlah desa dan kelurahan yang cerdas	-	-	KI 3	KI 3	Kel Desa		

2	Layanan Urus Pilihan							
2.1	Urusan Pertanian							
2.1.1	Kontribusi sektor terhadap PDRB (%)	-	-	-	-			
2.1.2	Produktivitas Ton/Ha	1.142	2.871	533,	2.075			
2.1.3	Produktivitas sayu	4,0	5,4	1,7	3,3			
2.2	UrusaKehutan							
2.2.1	Rehabilitasi Hutan	5,74	5,74	5,74	5,74	-		
2.2.2	Kerusakan ka hutan	24.71	23,4	23,4	23,4	25,17		
2.2.3	Kawasan Hut Tetap dikelola Institusi per pada Tingkat (unit )	-	-	-	-	-		
2.3	Urusan Energi dan Daya Mineral							
2.3.1	% Pertambangan t izin/liar	-	-	-	-			
2.3.2	% Kontribusi sekt pertambangan terl PDRB	15.77	18.90	22.90	-			
2.3.3	% Energi listrik d bar terbaru	76%	79%	80,54	81,30	89,25		
2.4	Urusan Pariw							
2.4.1	Kunjungan wi				16,	7.75		
2.4.2	Kontribusi sektor terhadap PDRB				16,93	35,58		
2.5	Urusan Kelauatan Perirka							
2.5.1	Jumlah produ	9.750	13.517	12.133	14.231	14.429		
2.5.2	% Capaian ta	77,7	82,4	108,	103,	103,4		
2.5.3	Jumlah-rata-konsumi	31,4	32,	33,6	38,	39,8		
2.6	Urusan Perdag							
2.6.1	% kontribusi sekt perdagangan terha	25,18	30,38	31,97	33,79			
2.6.2	Ekspor bersih per	44.0680	36.9640	43.4290	40.2610	39.7560		
2.7	Urusan Perindustri							
2.7.1	% kontribusi sekt terhadap PDRB	-	-	-	-	-		
2.7.2	Pertumbuhan indu keseluruhan	115	124	130	146	184		
2.8	Transmigrasi							
2.8.1	Transmigrasi swakarsa							
2.8.2	Kontribusi transm terhadap PDRB							



C	Aspek Daya Saing Daerah							
1	Angka konsumsi R (Tangga) per kapita							
2	Perbandingan fakt dengan produk ya menggambarkan n petani							
3	Persentase konsu pangan							
D	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
1	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan							
2	Jumlah orang/barang terangkut angkut							
3	Jumlah orang/barang dermaga/bandara/per tahun							
E	Fokus iklim berinvestasi							
1	Angka krimin							
2	Jumlah demo							
3	Lama proses perijinan	3 hari	3hari	3 hari	3 hari	3 hari		
4	Jumlah Perda yang mendukung iklim	4 Perd	4 Perd	4 Perd	4 Perd	4 Perc		
5	Persentase desa t swasembada							
F	Fokus Sumber Daya							
1	Rasio ketergantungan							
2	Rasio lulusas S terhadap total per							

### 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah dapat dibedakan menjadi Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Perencanaan Daerah dan 2) Identifikasi permasalahan di Rusa yang Perencanaan Daerah

#### 2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan

Secara umum hasil evaluasi ~~per bank sakenagiatap 201201~~ dan prediksi capaian kinerja dapat diuraikan permasalahan daerah yang dengan prioritas dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut

1. Kemampuan pendanaan pembangunan untuk mencapai prioritas
2. Masih ditemukan adanya salah penganggaran (misalnya sehingga tidak bisa direalisasikan).

## 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

### 2.3.1 Permasalahan Daerah pada Urusan Pelayanan Ur

#### 1. Urusan Pendidikan

Beberapa permasalahan pada urusan pendidikan di Kabupaten Barito

- a. Sarana Prasarana Pendidikan masih kurang dan perlu diperb.
- b. Tenaga kependidikan belum merata baik jumlah dan kemampuan latar
- c. Tingkat pelayanan pendidikan ke p d i t i a g k a b k i k n t e s u h a p n e a r p e l a y :  
pendidikan m e a r d a h t e r p e n c i l / p e d a l a m a n .
- d. Kompetensi dan relevansi serta d a e r a d s d i l i n g n p l e u r s a n d i s t a n g k a k a :  
e. Masih rendahnya b a k u k a l i t a s t a s t e n a g a p e n d i d i k d a n t e n a g a k e p

#### 2. Urusan Kesehatan

Beberapa permasalahan yang masih ada di Dinas Kesehatan I diantaranya adalah :

##### 1) Sumber Daya Manusia

- a. Distribusi tenaga kesehatan m a i s i d e n g a m k e b e l u a n h a s e s u A d a s  
kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan berlebih / m e  
dilain pihak ada sarana kesehatan yang masih kurang t e n a  
b. Tenaga kesehatan di Kabupaten Barito Selatan b e r l e m a b i s a  
untuk saat ini tenaga kesehatan yang berstatus PNS m a s  
tenaga Dokter umum, Dokter gigi di Puskesmas masih d i  
Kontrak. Begitupun dengan Tenaga Bidan dan Perawat s e  
d a m k o n t a r k d a e r a h .
- c. Terbatasnya Kuota penerimaan CPNS di kabupaten Bari  
serta masih adanya puskesmas yang tidak memiliki t e n a g  
Apoteker, Sanitarian / Kesehatan Lingkungan, a A n a l i s i s  
nutrisisionis.
- d. Kemampuan dan kapabilitas tenaga kesehatan masih b e  
sehingga masih ada tenaga kesehatan yang belum m a m  
kesehatan yang dibebankan.

##### 2) Pembiayaan Kesehatan.

Pengalokasiana Kesehatan d i e n g a k a b a d i 1 7 t a h u n l a l u , a k a n t  
seiring dengan peningkatan anggaran maka a k a m g s e m a k i  
dilaksanakan pada d i s e m p i 2 0 1 7 a n j a n g n y a P r o s e s a n g g a r a n d i  
memakan waktu sehingga beberapa k e d i a a h i r t e r a u b e a d d a m p a  
menjadi kurang maksimal dalam pelaksanaannya dan penyer

##### 3) Peran serta masyarakat

- a. Masyarakat masih belum banyak terlibat aktif dalam p  
dimas i m a s i n g w i l a y a h .

- b. Masih kurangnya kesadaran, ~~mampaan~~ ~~hidap~~ ~~sehat~~ bagi masyarakat untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal
- c. Pelaksanaan Posyandu yang merupakan kegiatan dari, ~~ol~~ masih mengandalkan kehadiran petugas kesehatan untuk sehingga ~~enali~~ ~~km~~ Posyandu oleh masyarakat masih kurang.

### 3. Urusan Pekerjaan Umum

Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi berkaitan Dinas Pekerjaan Umum ~~Barito Selatan~~ :

- a. Terjadinya ketidaksesuaian ~~gambare~~ ~~beberapa~~ kegiatan dengan lapangan.
- b. Terjadinya rangkap dalam hal pengawasan pekerjaan.
- c. Keberadaan dari jasa pelaksanaan bangunan yang kadang tidak pendaftaran penawaran.
- d. Kurangnya waktu pelaksanaan ~~deh~~ ~~ur~~ ~~tahun~~.
- e. Terbatasnya anggaran yang menyebabkan tertundanya pekerja
- f. Musim hujan yang berkepanjangan menyebabkan turunnya kw

### 4. Perumahan

Permasalahan Perumahan di Kabupaten Barito Selatan ~~masih~~ di kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan perumahan yang diambil bekerja dengan unsur terkait untuk memberikan p tentang budaya hidup bersih.

### 5. Urusan Penataan Ruang

Permasalahan ~~daya~~ ~~alam~~ pelaksanaan urusan penataan ruang dan pembangunan di wilayah perkotaan lebih memprioritaskan kepa menekankan pada fungsi ekonomi daripada fungsi ekologis dan

### 6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) dari tin Musrenbang pembangunan Nasional serta penyusunan Ran dilaksanakan sesuai petunjuk pemerintah ~~Barito~~ ~~Selatan~~ ~~Pes~~ ~~bbng~~ ~~ga~~ ~~nt~~ penjabaran APBD dapat diselesaikan pada akhir tahun. Penyusunan Laporan Kinerja pemerintah Daerah tidak me Penyusunan LAKIP dapat bekerja dengan baik ~~ki~~ ~~bu~~ ~~SKPD~~ ~~ki~~ ~~pa~~ dan capaian Kinerja yang lengkap. Monitoring Evaluasi, perencanaan pembangunan, sering terlambat ~~ser~~ ~~ken~~ ~~ber~~ ~~beda~~ dengan ~~rap~~ yang disampaikan oleh SKPD.

## 7. Urusan Perhubungan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Perhu

- a. Terbatasnya Sumber daya manusia yang memiliki kompe-  
teknis di bidang perhubungan.
- b. Terbatasnya tenaga Pendidik SPPT (PAPNS) saat ini yang t  
orang) di bidang perhubungan, khususnya penyidikan terhad  
sehingga pelaksanaan sidang di tempat operasi belum dapat
- c. Kurang tertib dalam disiplin waktu dalam berlalu lintas.
- d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemili  
uji untuk menguji/kir secara berkala kendaraannya.
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemilik kendaraa  
trayek dan usaha ijin angkutan.
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan

## 8. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan  
dijumpai adalah sebagai berikut :

- a. Penanganan Sampah dapat terlaksana sekitar 75%, sedangkan  
dikelola masyarakat (dibakar, dikubur, dan dibuang kesungai
- b. Data Kualitas air hanya diperoleh dari perusahaan, sehingga  
menyampaikan laporannya kepada apa kualitas air akan renc  
perusahaan yang secara rutin menyampaikan laporannya ada  
MTU, PT Artha Cantkrator, PT PLN dan PT BAP.
- c. Banyak pelaku usaha yang tidak melakukan kegiatan, disel  
masih terus menurun.
- d. Sebagian penduduk berada di Kecamatan diluar Kota Bu  
pembuangan sampah (TPS) yang ada hanya di Kota Buntok.
- e. Kurangnya SDM dan prasarana kerja dan dana
- f. Pengelolaan sampah masih ~~istimeogundakpissg~~

## 9. Urusan Pertanahan

Permasalahan disektor pertanahan adalah masih kecilnya  
terkait dengan masalah pertanahan. Solusinya adalah meningk  
BPN dalam setiap pelaksanaan kegiatan pertanahan.

## 10 Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Keterbatasan tenaga operator, petugas pelayanan serta da  
pengolahan data kependudukan untk verifikasi serta input d  
dimaksud.
- b. Adanya kegiatan bidang yang pelaksanaannya mengacu pada  
berlaku, sehingga dari keluruhan pagu anggaran pada Dinas

Sipil tidak dapat terserap secara 100% atau seluruhnya, dari ke kas daerah.

- c. Seringnya terjadi gangguan jaringan komunikasi data sehingga dengan baik dan juga pengiriman data ke pusat terjadi menghambat proses pencetakan dokumen terkait.
- d. Tidak tertibnya petugas registrasi alamat/keluarga melaporkan kependudukan, hal ini dikarenakan tidak tersedianya dana
- e. Pemerintah Desa tidak ada mengalokasikan dana baik dari APBD untuk pembuatan data kependudukan secara lengkap.
- f. Penerbitan Akta Kelahiran berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mensyaratkan Akta Perkawinan Orang tua bagi Nikah orang tua bagi muslim. Sedangkan kepemilikan Akta Kabupaten Barito Selatan baru ada sekitar 20,18%.
- g. Penerbitan Kartu Keluarga baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, pasal 5 ayat (1) point b.5, yang mengharuskan orang tua bagi Non Muslim dan Buku Nikah orang tua bagi yang muslim.

#### 11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Belum optimalnya lembaga perlindungan anak.
2. Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan perempuan belum optimal Kesekretariatan-BSPK Kecamatan dan Kelurahan Desa yang peran masyarakat dalam-Bayia BaruGISahir.
3. Belum tersedianya dana untuk visum KDRT dan ruang konseling

#### 12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Permasalahan pada KB dan Keluarga sejahtera adalah penyuluh KB. Permasalahan yang dihadapi antara lain masih ber KB, masih adanya PUSURUSMada.

#### 13 Urusan Sosial

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembangunan Kabupaten Barito Selatan antara lain adanya pendatang dari luar PMKS sulit untuk dapat diintegrasikan yang dilakukan untuk permasalahan tersebut sama bedanya dengan trantib Kabupaten B memberikan penyuluhan dan bimbingan sosial dalam upaya menumbuhkan potensi) serta kagang (PMKS) PMKS kedepan dapat

seminimal mungkin.

#### 14 Urusan Ketenagakerjaan

Pada bidang penempatan tenaga kerja permasalahan yang dihadapi adalah pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja di Kabupaten Barito Selatan. Pergerakan tenaga kerja ke luar negeri untuk mencari pekerjaan di negara lain sangat selektif, pemagangan ke luar negeri sangat ketat dan selektif, dihadapi pada bidang ini masalah utama adalah kurangnya dana yang dimiliki Sekretariat LKS tripartit sehingga permasalahan ke lapangan sangat terbatas, rendahnya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, masih ada perusahaan-perusahaan yang belum dianggap penting, masih banyak perusahaan yang tidak dalam program Jamsostek, masih banyak perusahaan yang keadaannya tenaga kerjanya (Wajib Laporkan Ketenagakerjaan), masyarakat belum mengerti dan memahami hak dan kewajiban Normatif berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

#### 15 Urusan Koperasi dan UKM

Dalam upaya mencapai sasaran masih ditemukan adanya permasalahan sebagai berikut:

1. Kualifikasi Koperasi yang telah terbentuk perkembangannya
2. Dengan Jumlah Koperasi yang semakin bertambah, persaingan yang kurang sehat diantara Koperasi sehingga berdampak Koperasi kedepan secara kualitatif.
3. Kemitraan Koperasi dengan Perusahaan swasta, BUMN ataupun rendah (sebagai mitra) disebabkan karena Koperasi kesulitan dalam teknis Bank (tidak Bankable).

#### 16 Urusan Penanaman Modal

Peningkatan investasi di Kabupaten Barito Selatan masih kecil, belum optimalnya investasi dan belum maksimalnya administrasi penanaman modal.

#### 17 Urusan Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kebudayaan adalah masyarakat yang belum mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga tumbuh dengan daerah lainnya

#### 18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan tahun 2014, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 masih melekat pada kendala yang dihadapi pada Urusan kepemudaan dan Olahraga

- 1) Penanganan Kepemudaan dan Olahraga masyarakat lanjut usia dan lanjut usia Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dengan kualifikasi bidangnya, Sehingga pengembangan tidak dapat dilaksanakan
- 2) Keterbatasan dana / anggaran merupakan permasalahan yang menghambat pengembangan kepemudaan dan Olahraga di Daerah.

Pemecahan Masalah.

- 1) Keterbatasan sumber daya manusia dapat diatasi dengan pemberian kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan kejurusan, bimbingan teknis dan pelatihan dengan ketentuan yang berlaku.
  - 2) Diperlukan tambahan dana / anggaran yang bersumber pada APBD Kabupaten Barito Selatan maupaun sumber lain seperti APBD Propinsi Kalimantan Selatan , dapat menghasilkan hasil yang dicapai akan lebih meyakinkan.
  - 3) Upaya penggalan dan pengembangan Kepemudaan dan Olahraga pendekatan terpadu dengan memperhatikan aspek sosial budaya, Kearifan lokal, faktor teknis dan sisi ekonomi dalam prinsip konservasi Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
  - 4) Peningkatan kualitas informasi dan pemasaran Kepemudaan dan Olahraga, senantiasa diupayakan dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi yang ada.
  - 5) Diupayakan administrasi pengelolaan Pajak Hotel, Rumah Sewa dan Rekreasi dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam bentuk laporan berkala kepada Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Barito Selatan sehingga mempermudah pembinaan teknis.
  - 6) Upaya penggalan dan pengembangan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial budaya, kearifan lokal dan ekonomi dalam rangka mempromosikan pariwisata alam dan budaya dengan pendekatan yang ramah lingkungan.
  - 7) Perlu dibuat perda masalah TDUP untuk kepentingan sebagai penunjang fasilitas Pariwisata.
  - 8) Perlu dilakukan sinergitas berbagai komponen terkait dalam menunjang Pariwisata.
- 19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- Rasa Nasionalisme dan Kebangsaan sudah cukup baik dan demikian kedepan selalu diupayakan untuk dilaksanakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat yang mengarah ke disiplin, kepatuhan dan keadilan.

## 20 Urusan Otonomi Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan masalahnya kepengawasan, belum optimnya pengelolaan tenaga trantiberbatasan tenaga penanggulangan bencana. tenaga kepegawaian dan masih lambatnya proses administrasi disamping melibatkan instansi lain seperti Badan Korpri Jawa Provisi Kalimantan Kalimantan PAN dan RB dan juga Sekretariat Khusus untuk bidang Satua Polisi Pamong Praja, terdapat bebe

1. Terbatasnya dana operasional.
2. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dan jumlah Satpol PP
3. Belum tersedianya dana kegiatan penanganan bencana pada
4. Sarana transportasi untuk operasional kurang memadai.
5. Sarana kelengkapan personil masih kurang seperti : 1) Ka boot; 3) Helm pengemudi; 4) USB pengaman; 5) Pentungan Handytalky; dan 7) Handycamp.

## 21 Urusan Ketahanan Pangan

1. Sekitar 68,4% dan 5,4% adalah untuk gaji dan tunjangan Aparatur Sipil dari BOP, Gaji PPL dan perjalanan total Rp 25 @ 500.000.000.000 33,6% untuk operasional Badan Ketahanan Pangan dan Pel lebih dari separuh anggaran hanya untuk Belanja Pegawai dan
2. Penyediaan cadangan tanaman pangan (stok pangan) untuk Pangan akibat bencana alam tidak bisa dianggap sesuai amanat SPM.
3. Sertifikasi legal aspek kelembagaan petani; Kelompok tani masih belum bisa dianggarkan kegiatan kelembagaan petani yang berbadan hukum (legal aspek) di
4. Usulan rehab berat kap atas sudah diusulkan sejak tahun 2011 masih belum bisa disetujui permasalahannya untuk UKP E Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabu
5. Masih terdapat indikator capaian kinerja yang belum bisa sebagaimana tercantum dalam RPKM dan Rencana 2012

## 22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Per  
1) Pengetahuan dan Keterampilan yang telah diberikar kepada masyarakat belum optimal dalam usaha, sehingga nilai tambah yang didapatkan belum optimal



- 2) Teknologi yang diterapkan oleh Pokmas belum sepenuhnya rekayasa murni (Perlembagaan yang sudah ada) sehingga produk memiliki spesifikasi yang sama sehingga daya saingnya kurang o

#### 23 Urusan Statistik

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan statistik dari sumber yang tersedia sering kurang lengkap dan akurat yang mengakibatkan administrasi dan sistem KPD yang menanganinya.

#### 24 Urusan Komunikasi dan Informatika

Secara umum pencapaian sasaran tersebut telah berhasil dengan masyarakat akan arti pentingnya. Akan tetapi, masih terdapat kendala masalah antara lain:

- 1) Terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki sebagai tenaga teknis di bidang infokom
- 2) Terbatasnya jumlah SDM di lingkungan kecamatan serta masih ada yang diperbantukan di Kecamatan
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana operasional infokom yang siaran keliling untuk penyebarluasan informasi melalui lain untuk mendukung kelancaran tugas infokom
- 4) Belum optimalnya dukungan lembaga desa maupun sekolah di bidang informatika
- 5) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk para wartawan sebagai partner pemerintah dalam hal pembangunan
- 6) Belum tersedianya ruangan telepon kedaruratan atau call center menjaganya selama 24 jam.

#### 25 Urusan Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Perpustakaan Umum Kabupaten Enrekang adalah :

- 1) Masih kurangnya kemampuan aparatur yang bertugas dalam sehingga perlu dilaksanakan Bimbingan teknis dan juga Pustakawan.
- 2) Masih rendahnya minat bagi Masyarakat Umum, dengan indikator kunjungan ke Perpustakaan Umum, sehingga perlu ditingkatkan tentang pentingnya budaya baca dan gemar membaca.
- 3) Masih terbatasnya sarana Perpustakaan Barito Selatan Kabupaten Enrekang

#### 26 Urusan Arsip Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kearsipan

- 1) Terbatasnya jumlah petugas kearsipan

- 2) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas K
- 3) Belum adanya Jabatan Fungsi Arsiparis

## 2.2 Permasalahan Daerah pada Forkuis Kabupaten

### 1. Urusan Pertanian

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pertani

- 1) Menurunnya debit air irigasi dan sebagiamadassarijaskin iri
- 2) Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan ta
- 3) Terjadinya alih fungsi (sawah) menjadi non pertanian.
- 4) Masih tingginya konsumsi beras dan masih rendahnya gizi kuranganberimb
- 5) Adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).
- 6) Pada saat musim banjir dan puncaknya musim kemarau, bany menghasilkan, sehingga mengurangi ketersediaan pangan ba

### 2. Urusan Kehutanan

PermasalahannKyangdihadapi secara umum adalah sebagai

- 1) Belum tersusunnya Dokumen perencanaan RHL, RTK, RPRI kegiatan belum dilaksanakan.
- 2) Terbatasnya personil pada Bidang Kehutanan dibanding
- 3) Masih yadalamancaman gangguan keamanan hutan yang sa sehingga menimnuletakjadipenyempitan peningkatan degradasi hutan.
- 4) Belum terfasilitasi sarana secara maksimal proses penPidana Kehutanan.
- 5) Beluandanya dukungan personil, sarana dan prasarana y: pengamanan hutan.
- 6) Adanya beberapa perubahan bentang alam, sehingga batas k mantap/kurang jelas antara tanah Negara dengan lahan milik
- 7) Masih belumnya terkait kewenangan pemerintah Kabupaten : setelah ditetapkan dnyalablog Nomor 23 Tahun 2014 tentang l Daerah.

### 3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

#### 1) Bidang Pertambangan

- a. Dari (32) galuzidubPera tambangan (IUP) hanya yadkan1 IUP PT. Bara PrimayaMg diilaksanakan operasi dan terakhir berproduksi 10.433 ton Batu Bara, dan sejak tahun 20 melaksanakan operasi sampai sekarang.

- b. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemekanaan maka sejak tahun Oktober 2014 kewenangan bidang pertambangan dipegang oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - 2) Bidang Kelistrikan
    - a. Tahun 2015 Rasio Kelistrikan sekitar 89,25%.
    - b. Ada 4 (empat) desa yang tidak mendapat pasokan listrik.
4. Urusan Pariwisata
 

Permasalahan dan kendala yang dihadapi pada Urusan Pariwisata adalah sebagai berikut :

  - 1) Penanganan keluhan wisatawan terkendala karena kurangnya tenaga profesional yang memiliki Kualifikasi Sarjana Pariwisata, sehingga penanganan keluhan tidak dapat berjalan maksimal.
  - 2) Keterbatasan ketersediaan dana dan anggaran.
  - 3) Pengelolaan Pajak Hotel, Rumah Makan dan Hiburan tidak diawasi dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan tetapi oleh Kabupaten Barito Selatan, Sehingga mengalami kendala dalam Pemecahan Permasalahan.
    - 1) Keterbatasan sumber daya manusia di bidang pariwisata, kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti/melanjutkan penjenjangan, kursus, bimbingan teknis dan pelatihan pariwisata
    - 2) Diusulkan penambahan dana / anggaran yang bersumber dari
5. Urusan Kelautan dan Perikanan
 

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan perikanan di Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

  - 1) Biaya produksi yang masih tinggi terutama harga pakan ikan usaha dan akses permodalan terbatas karena masih usaha skala kecil.
  - 2) Masih adanya kegiatan Illegal Fishing (ikan ilegal) dan penggunaan bahan kimia berbahaya yang merusak kelestarian sumberdaya perikanan.
  - 3) Pengolahan Hasil Perikanan masih bersifat tradisional dan belum terintegrasi dengan perindustrian perikanan.
  - 4) Masih belum optimalnya Balai Benih Ikan (BBI) Palu Rejo dan masih membutuhkan benih ikan dalam daerah masih tergantung dari luar daerah.
6. Urusan Perdagangan
 

Permasalahan utama urusan Perdagangan adalah sebagai berikut :

  - 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan perlunya kepemilikan

- 2) Adanya peraturan pusat yang menyatakan bahwa untuk SIUP/TDP dikenakan (biaya upah 0), itu menyebabkan pen- dari sektor perijinan SIUP/TDP tidak bisa mencapai target.
  - 3) Rendahnya kuantitas dan kualifikasi SDM aparat pembin- perdagangan.
  - 4) Masih adanya para pengusaha yang tidak kunjung/pembah- SIUP/TDP dengan alasan karena kegiatan usahanya tidak ak- tidak ada ditempat.
  - 5) Rendahnya wawasan pelaku usaha UKM terhadap promosi.
  - 6) Terbatasnya prasarana dan sarana opetasi/sarankas aparantap- transportasi
  - 7) Terbatasnya sarana dan prasarana kemetrolagian serta yang tersedia.
7. Urusan Perindustrian
- Permasalahan utama urusan perindustrian adalah antara lain :
- 1) Kurang memadainya Sarana dan Dayas/ki kualitas maupun kuanti
  - 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana pembinaan.
  - 3) Ketatnya tingkat persaingan pasar.
  - 4) Dinamisnya selera konsumen.
  - 5) Tinggiya produksi.
  - 6) Kurang kondusifnya iklim usaha.
8. Urusan Transmigrasi
- Permasalahan utama urusan Transmigrasi di Kabupaten Barito S- sampai saat ini Kabupaten Barito Selatan Khususnya dan Pro- umum sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur Kalimantan 1- penerimaan Transmigrasi Kalimantan Tengah, sehingga untu- Barito Selatan tidak terdapat lokasi baru untuk Transmigrasi. urusan transmigrasi adalah hanya dalam rangka untuk melaku- transmigrasi yang sudah ada.

## BAB III

### RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Kabupaten Barito Selatan berikut karakteristik dan proyeksi perekonomian 2018 digambarkan dalam melalui rancangan kerangka daerah berdasarkan atas analisis ekonomi. Bab ini membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Barito Selatan beserta dinamika yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah ekonomi daerah yang memuat penjelasan yang dikaitkan dengan sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang pembangunan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja pembiayaan daerah.

#### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

##### 3.1.1 Telaah Ekonomi Nasional

Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia 2018 yang diterbitkan oleh Badan Indonesia, perekonomian Indonesia saat ini menunjukkan positif yang ditandai dengan stabilitas ekonomi semakin baik serta pertumbuhan yang semakin bergunanya perekonomian sepenuhnya adalah karena masih terdapat permasalahan defisit anggaran dan defisit neraca perdagangan yang akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang tidak merata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dampak langsung pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2016 adalah 5,10%. Hasil ini lebih rendah dari asumsi dalam (APBN) sebesar 5,5% sementara itu, stabilitas ekonomi juga tercermin dari nilai tukar rupiah yang relatif stabil. Nilai tukar rupiah sepanjang tahun Rp. 1307 per dollar Amerika Serikat (USD) dibandingkan asumsi APBN sebesar 1350 per dollar USD (Sumber: <http://ekbis.sindonews.com/read/116-mulya-ekonomi-2016-11-16-51483427>). Depresiasi mata uang Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal yaitu pertumbuhan yang lambat dan dividen, serta faktor eksternal yang dipicu oleh krisis keuangan di Amerika Serikat. The Fed telah melakukan depresiasi mata uang, penerimaan negara dari sektor mengalami penurunan akibat rendahnya harga minyak dunia. Tidak diiringi dengan meningkatnya permintaan gas yang menyebabkan harga gas rendah. Realisasi harga minyak mentah Indonesia saat ini adalah 40 dollar AS per barel. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi pada konsumsi rumah tangga, namun pertumbuhan pengeluaran pemerintah

berbagai paket kebijakan pertumbuhan ekonomi makro  
Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada  
Gambar 3.1

Sumber : RKP 2017 Rancangan

Asumsi Ekonomi Makro Indonesia di Tahun 2018 dapat dilihat pada  
Gambar 3.2

Sumber : [http://musrenbangnas.bappenas.go.id/files/rakorbangpus/01 M  
Awal RKP 2018](http://musrenbangnas.bappenas.go.id/files/rakorbangpus/01_Musrenbangnas_Awal_RKP_2018)

Kondisi ekonomi Indonesia diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan kondisi ekonomi global. Walaupun perekonomian Indonesia yang lebih baik, antara lain masih disebabkan oleh tiga hal mendasar yaitu penurunan harga minyak dunia dan kebijakan suku bunga Bank Sentral. Perlambatan Tiongkok memberi dampak negatif. Hal ini, tentu pola ekspor Indonesia pun harus dihindarkan, jadi bila terjadi konsumsi. Terkait dengan harga minyak yang rendah, Indonesia bergantung terhadap minyak mentah sebagai sumber utama suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat yang mempengaruhi diantisipasi agar sektor keuangan Indonesia tetap dalam kondisi

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan koordinasi agar ekonomi baik makro, moneter, dan fiskal. Belanja dalam APBN dan Belanja (APBN) dalam APBD salah satu faktor pertumbuhan. Tahun 2011 ini, pemerintah mengupayakan adanya pemerataan, dimana distribusi penyerapannya juga. Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan APBN baik, baik dari sisi penerimaan maupun pembiayaan. Lebih lanjut, pemerintah juga berharap memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sehingga Indonesia menjadi lebih baik. Asumsi makroekonomi Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3

#### ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO TAHUN 2017

Sumber: <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>

### 3.1.2 Telaah Ekonomi Provinsi Kalimantan

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah mengalami perlambatan pada tahun 2016 tumbuh sebesar 6,4 % (ctc) atau mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 7,00% (ctc). Kalimantan Tengah pada tahun 2016 tumbuh sebesar 8,6 % (yoy) atau meningkat dari triwulan sebelumnya. Akselerasi kinerja ekonomi Kalimantan Tengah meningkat pada tahun 2016 karena adanya peningkatan komponen ekspor terutama sektor pertambangan di sisi lain sektor pertanian dan keuangan. (Sumbawa, 2017)

Berikut ini merupakan grafik pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2013.

Gambar 3.1  
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2013

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2017

Bank Indonesia Kalimantan Tengah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah cenderung mengalami perlambatan masih berada dalam kategori tinggi yaitu > 5% (yoy) perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah tahun 2017 antara lain diakibatkan oleh dampak dari penurunan kegiatan triwulan I 2017. Sementara itu, sektor pertanian diperkirakan akan berdampak pada penurunan produksi TBS (Tandan Buah Segar) dan TBS (Tanaman Buah Segar).

Dari segi ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah karena upah buruh tergolong rendah dan sektor pertanian Kalimantan Tengah juga sangat berpotensi dikembangkan.



sekarang ini p... produsen kelapa sawit terbesar ke tiga dan ke e  
 Indones... Sedangkan segi Internal pendukung prediksi tersebut,  
 pembangunan di bidang sektor rill melalui p... bl...  
 peng... sisi produksi pertanian.

Kemudian proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalur  
 listrik, dan pelabuhan, yang disertai dengan...  
 ekonomi... Pemerintah... melakukan monitoring dan evaluasi  
 Pengawasan Pertumbuhan Ekonomi maupun Tim Evaluasi Percepat

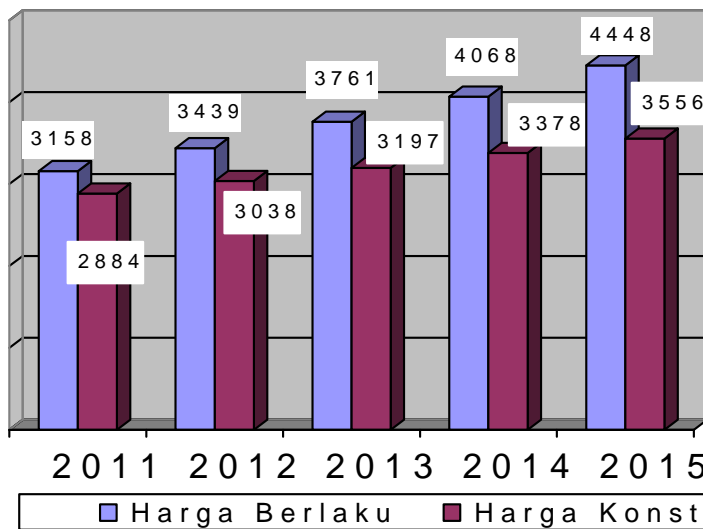
Inflasi Kalimantan Tengah pada... dibandingkan triwulan  
 menurun di... sebelumnya. Inflasi Kalimantan Tengah t  
 rendah dari inflasi Kalimantan sebesar 3,40 % (yoy), dan nasion  
 tekanan inflasi Kalimantan Tengah disebabkan...

### 3.1.3 Telaah Ekonomi Kabupaten Barito Selatan

#### 3.1.3.1 Struktur Ekonomi

Indikator ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan deng  
 laju inflasi dan kesempatan...  
 produksi bergerak menjadi ke...  
 tulang punggung perekonomian suatu daerah dan semakin besa  
 daerah terhadap sektor ekonomi tersebut

Gambar 35  
 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Barito Selatan  
 (dalam Milya Rupiah)



Sumber: Kabupaten Barito Selatan

PDRB Barito Selatan atas dasar... tahun  
 milyani merupakan total nilai t...

ekonomi Barito Selatan Sedangkan PDRB bagian harga tahun 2010 pada tahun 2015 mencapai 35,507 milyar.

Struktur perekonomian Kabupaten Barito Selatan didominasi oleh Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; kategori pertambangan dan transportasi dan pergudangan memberikan kontribusi 50,49% dari pembentuk PDRB Barito Selatan tahun 2015. Dari kategori tersebut, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan penyumbang terbesar Kabupaten Barito Selatan sebesar 62,0

Kontributor terbesar dalam struktur ekonomi adalah Sektor Pertanian yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Barito Selatan sebesar 62,5% dalam periode 4 triwulan tahun 2015. Kontribusi sektor ini 2015 mengalami penurunan menjadi 25,9% dari kontribusi sektor pertambangan dan penggalian antara lain disebabkan oleh

Gambar 36  
Struktur Ekonomi Barito Selatan 2015

Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan, 2015

Sektor transportasi dan pergudangan merupakan kontributor Barito Selatan tahun 2015 sebesar 18,9%. Kontribusi transportasi dan pergudangan

akaterus menerus meningkat sejalan dengan pembangunan infra Barito Selatan. Meningkatnya aktivitas ekonomi baik masyarakat akan mendorong pertumbuhan sektor transportasi. Seperti diketahui bahwa di Kabupaten Barito Selatan telah dibangun jembatan Kalahi antara Kabupaten Barito Selatan ke Kota Palangka Raya semakin lancar.

### 3.1.3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran mengenai proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh dunia usaha maupun masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan, kemakmuran dan taraf hidup. Karena itu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan pemerataan penduduknya merupakan salah satu keberhasilan pembangunan ekonomi dan masyarakat. Perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil diukur melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan.

Seiring dengan membaiknya perekonomian Nasional pada tahun 2008, perekonomian Barito Selatan tahun relatif stabil dan menunjukkan tren peningkatan. PDRB Barito Selatan pada tahun 2008 sebesar Rp 5.69 triliun.

Gambar 37  
Pertumbuhan Ekonomi Barito Selatan (Persen)

Sumber: Kabupaten Barito Selatan

Meningkatnya kinerja sektor Keuangan, Perbankan dan lembaga keuangan bukan bank yang dibutuhkan dalam mendukung pembangunan menunjukkan perkembangan yang ditunjukkan dengan banyaknya bank komersial yang beroperasi hingga tingkat kecamatan.

Gamb 38  
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha 2012-2014 (Persen)

Sumber Kabupaten Barito Selatan

### 3.1.3 Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Sumber pertumbuhan menunjukkan besaran persentase masing-masing sektor ekonomi terhadap pertumbuhan total ekonomi. Angka ini menunjukkan peranan **bagian pertumbuhan** masing-masing sektor terhadap pertumbuhan total.

Tab 31  
Sumber Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Sektor

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut (Persen)		
	2012	2013	2014
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.3	3.0	3.5
Pertambangan dan Pertambangan	5.3	5.2	6.3
Industri Pengolahan	2.2	3.0	3.7
Pengadaan Listrik dan Gas	10.6	8.0	11.4
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Air Laut	4.2	2.2	6.1
Konstruksi	2.7	7.5	9.3
Perdagangan Besar, Perdagangan Ritel, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.1	6.7	5.3
Transportasi dan Perhubungan	5.0	6.1	6.0
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.9	9.5	9.5
Informasi dan Komunikasi	9.2	9.0	9.1
Jasa Keuangan dan Real Estate	12.1	5.5	9.6
Real Estate	6.9	7.8	6.4
Jasa Perusahaan	5.8	5.5	5.1
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.4	5.3	5.8

Jasa Pendidikan	9	4.9	2.9
Jasa Kesehatan dan	7.0	6.3	6.6
Jasa lainnya	7.7	6.8	4.7
Jumlah	5.3	5.2	5.6

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan

Sektor yang menjadi sumber pertumbuhan adalah sektor yang bergantung dengan perkembangan kondisi perekonomian pada 2014 sektor pengadalan listrik dan energi jadi sumber pertumbuhan tertin pertumbuhan ekonomi Barito Selatan.

Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi yang dicapai dari sektor pengadalan listrik dan energi sebesar 93,4 persen, sektor informasi dan komunikasi sebesar 91,5 persen dan sisanya bersumber dari sektor lainnya.

### 3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian di Daerah Tahun 2011-201

Tahun 2011 kondisi perekonomian Barito Selatan sedang mengalami ketertarikan, hal ini terjadi sebagai akibat dari efek domino dari turunya harga minyak mentah dunia dan juga turunya beberapa Batu Bara harga minyak sawit, Cendana, Palm, Oli/GaOK, komoditi karet, serta beberapa komoditi lainnya yang kemudian akan berpengaruh Kabupaten Barito Selatan.

Dari sisi yang lain, dengan semakin tidak stabilnya nilai terdapat, dimana hal ini berdampak kepada tidak stabilnya harga B memicu terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok.

Efek langsung yang dapat dirasakan adalah turunya daya beli barang kebutuhan dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap rendahnya permintaan terhadap Produk Domestik Regional Bruto untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi Barito Selatan.

Untuk pemulihan kondisi sektor yang dialami waktu dekat sektor bergerak kembali seiring dengan proyek pembangunan pemerintah di sektor, permintaan terhadap produk/ bahan baku untuk kebutuhan meningkat. Dari kegiatan ini diharapkan mampu menyerap tenaga banyak, sehingga pengangguran terbuka dapat ditekan dan penda

Diperkirakan dalam waktu dekat dengan adanya kebijakan pengendalian dan penyediaan BBM di pra masyarakat maka masalah ketersediaan BBM dan fluktuasi harga BBM eceran di masyarakat berikutnya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (DPRD) Daerah dapat melaksanakan fungsinya untuk menormalisasikan gejala

membantu memperlancar penyaluran distribusi barang, melakukan lainnya. Sehingga dengan kondisi sebagaimana yang diharapkan dapat bergerak secara normal dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan sebesar 6,5 persen. Perencanaan kondisi perekonomian di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 laju pertumbuhannya akan sama seperti Tahun 2018 sebesar 6,5 persen.

Perekonomian Kabupaten Barito Selatan baik secara langsung dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang strategis bila dilihat dari potensi sumber daya alam dan pemanfaatan DAS Barito, maka perekonomian Barito Selatan akan berkembang pesat. Berdasarkan hal tersebut, maka faktor eksternal perekonomian Barito Selatan adalah:

Pertama, kondisi strategis kota Buntok dapat dimanfaatkan untuk ekonomi seperti sektor Jasa Perhotelan, Hotel, Pariwisata dalam intensifikasi kebijakan fiskal, penyediaan dan pengembangan mempengaruhi pengembangan sektor riil yaitu Kertuganti, dan lain-lain. Kedua, kebijakan fiskal, penyediaan dan pengembangan mempengaruhi pengembangan sektor riil yaitu Kertuganti, dan lain-lain. Ketiga, kebijakan fiskal, penyediaan dan pengembangan mempengaruhi pengembangan sektor riil yaitu Kertuganti, dan lain-lain. Keempat, kebijakan fiskal, penyediaan dan pengembangan mempengaruhi pengembangan sektor riil yaitu Kertuganti, dan lain-lain.

Seperti halnya yang dihadapi pada tahun sebelumnya Kabupaten Barito Selatan diprediksi akan menghadapi beberapa tantangan pokok yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu harus dapat diatasi secara proporsional. Tantangan tersebut meliputi:

- Meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan hasil pertumbuhannya ini dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja, pengurangan jumlah pengangguran, dan peningkatan mutu pelayanan publik.
- Memantapkan kinerja perekonomian dan pemberdayaan masyarakat perekonomian Barito Selatan yang telah menunjukkan keberhasilan dipertahankan dan dimantapkan. Peran serta masyarakat tentu saja mungkin agar pertumbuhan dan perkembangan perekonomian kesejahteraan masyarakat Barito Selatan.
- Meningkatkan pemberdayaan kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan perekonomian Barito Selatan.
- Menciptakan iklim kondusif bagi perekonomian daerah. Pemerintah semakin dituntut untuk menciptakan iklim kondusif yang kondusif sebagai salah satu prasyarat dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi.
- Menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Untuk menjaga kestabilan investasi dalam keadaan stabil yaitu melalui ketentraman dan

- f. Menyediakan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa.

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2006 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perimbangan nasional mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan serta melakukan analisis keuangan daerah yang tepat guna dan efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

#### 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

##### 3.2.1.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011

Pendapatan daerah pada tahun 2010 sebesar Rp. 265.953.220,240, dibandingkan dengan target tahun 2011 sebesar Rp. 333.014.543.187,25

Secara umum Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) yaitu : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) Dana Perimbangan; dan 3) Hibah. Dari ketiga komponen tersebut, hampir semua kelompok kenaikan, dan PAD memberikan kontribusi yang sangat besar pada Daerah Tahun Anggaran 2011 dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2010

Adanya perkiraan kenaikan pendapatan daerah sebagai berikut

##### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp. 570.150.000,00 sebesar Rp. 540.452.020,77 persen dibandingkan dengan target tahun 2010 sebesar Rp. 478.000,00.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari 4 (empat) yaitu: 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Aset Daerah; dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dari keempat jenis pendapatan asli daerah tersebut, Pajak Daerah merupakan komponen yang paling dominan dibandingkan dengan jenis-jenis pendapatan asli daerah lainnya.

### 1.1. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah terdiri dari : a) Pajak Hotel; b) Pajak Reklame; e) Pajak Penerangan Jalan; f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan Pajak PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan; dan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017, apabila dibandingkan dengan target pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp 1.258.743.600,00, maka asumsi pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2018 sebesar Rp 1.204.800,00 atau 1217 persen. Penurunan pendapatan Pajak Daerah didasarkan pada hasil perkiraan penerimaan pajak yang mengalami penurunan target dengan jumlah yang signifikan rata-rata mengalami kenaikan dibandingkan dengan target tahun 2017. Beberapa Pajak yang mengalami kenaikan adalah :

- 1) Pajak Hotel mengalami kenaikan sebesar Rp 600.000,00 atau sekitar 66,67% sehingga asumsi untuk tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 1.000.000,00 dari pada tahun 2017 sebesar Rp 600.000,00.
- 2) Pajak Restoran mengalami kenaikan sebesar Rp 800.000.000,00 sehingga asumsi untuk penerimaan Pajak Restoran pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 4.100.000.000,00 dari semula pada Tahun 2017 sebesar Rp 3.300.000.000,00.
- 3) Pajak Hiburan mengalami kenaikan sebesar Rp 11.400.000,00 sehingga asumsi untuk penerimaan pajak hiburan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 15.000.000,00 dari semula pada Tahun 2017 sebesar Rp 11.400.000,00.
- 4) Pajak Reklame mengalami kenaikan sebesar Rp 754.097,00 sehingga asumsi untuk penerimaan Pajak Reklame pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 1.945.902.804,00 dari semula pada Tahun 2017 sebesar Rp 1.191.805.707,00.
- 5) Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan sebesar Rp 754.097 persen, sehingga asumsi untuk penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada Tahun Anggaran 2018 menjadi sebesar Rp 1.945.902.804,00 dari semula pada Tahun 2017 sebesar Rp 1.191.805.707,00.
- 6) Pajak Sarang Burung Walet mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 31,6% sehingga asumsi untuk penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 1.204.800,00 dari semula pada Tahun 2017 sebesar Rp 914.700,00 yang cukup signifikan tersebut didasarkan pada banyaknya potensi bangunan yang terdata hampir 1.474 bangunan, dan dari potensi tersebut dilakukan optimasi langsung turun ke lapangan.



pemberian sosialisasi pemungutan bahkan sampai dengan n pemilik sarang burung walet sesuai dengan ketentuan dan p

7) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan sebesar Rp200.000,00 atau sebesar 6,67% sehingga asumsi Pajak pener Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 2018 menjadi sebesar Rp200.000,00 dari semula pada tahun 2017 sebesar Rp300.000.000,00

Sedangkan jenis Pajak yang akan mengalami penurunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PBB-P4) golongan I yang sangat signifikan sebesar Rp4.563.941.800,00 sehingga asumsi untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman golongan I tahun 2018 sebesar Rp4.563.941.800,00 dari semula pada tahun 2017 sebesar Rp 8.100.000.000,00. Khusus untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman golongan I tahun 2018 akan sama seperti target tahun anggaran 2017 yaitu sebesar Rp1.600.000.000,00.

### 1.2. Retribusi Daerah

Objek Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu: 1) Retribusi Jasa Umum; 2) Retribusi Jasa Usaha; dan 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari : a) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Pengiriman Dokumen; e) Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor; g) Retribusi Pelayanan Terpadu; dan h) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : a) Retribusi Sewa dan Penyediaan Tempat Pelelangan; c) Retribusi Terminal; d) Retribusi Tempat Pemotongan Hewan; f) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan g) Retribusi Fasilitas Rekreasi dan Olahraga.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari : a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c) Retribusi Izin Tempat Pelelangan; dan e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp5.446.070,9.8. Apabila dibandingkan dengan target pendapatan APBD Muri tahun 2017 sebesar Rp3.140,000, maka pendapatan Retribusi Daerah mengi sebesar Rp19.578.800,00 atau 0,36% dari total APBD.

Dari ketiga jenis Retribusi dimaksud, Jenis Retribusi yang diusulkan untuk tahun 2017 sehingga ditargetkan sama dengan Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan (Pelayanan) sebesar Rp307.228.000,00
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp67.228.000,00
- 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp74.228.000,00
- 4) Retribusi Pelayanan Pasar (Pelataran) sebesar Rp383.062.660,00
- 5) Retribusi Pelayanan Pasar (Pelataran) sebesar Rp457.124.480,00
- 6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp25.000.000,00
- 7) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp25.000.000,00
- 8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp5.000.000,00

Jenis Retribusi lainnya yang diusulkan sebesar Rp1.847.102.660,00 apabila dibandingkan target Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.827.523.860,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp19.578.800,00 atau sebesar 1,07 persen. Dari jenis Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (penyewaan tanah/bangunan) yang mengalami kenaikan sebesar Rp3.530,00, sehingga pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp74.200,00 dari semula pada Tahun 2016 sebesar Rp 1.827.523.860,00

sedangkan untuk objek retribusi lainnya pada jenis Retribusi dengan target pada Tahun Anggaran 2017 yaitu sebagai berikut :

- 1) Retribusi Tempat Parkir sebesar Rp1.800.000,00
- 2) Retribusi Terminal sebesar Rp12.500.000,00
- 3) Retribusi Khusus Parkir sebesar Rp75.000.000,00
- 4) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp1.045.500.000,00
- 5) Retribusi Tempat Rekreasi sebesar Rp95.600.000,00
- 6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp.7.500.000,00

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diusulkan sebesar Rp1.030.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan target Tahun Anggaran 2017 terjadi perubahan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp455.000.000,00
- 2) Retribusi Izin Gangguan/keramaian sebesar Rp558.500.000,00
- 3) Retribusi Izin Usaha sebesar Rp6.500.000,00
- 4) Retribusi Izin Usaha Perikanan sebesar Rp

### 1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp1.525.514,00, dianggarkan sama seperti tahun anggaran 2017

Objek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Diserahkan Atas penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang berasal dari sumber terutama dari perusahaan di bidang Pertambangan Kalimantan Tengah dengan besaran pendapatan yang sama seperti tahun 2017

#### 1.4. Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan dari Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, adalah me Objek Pendapatan Daerah khususnya dari kelompok Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari : 1) Hasil Per Disahkan; 2) Penerimaan Jasa Giro; 3) Penerimaan Bunga D Pajak; 5) Pendapatan Denda Retribusi; E. Residua (A. Jamin Pendapatan dari Penerimaan Daerah

Terdapat peningkatan pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD 2018 ditargetkan sebesar Rp 68.919.441,00 apabila dibandingkan dengan penerimaan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 60.583.660,00 atau sebesar 13,21

Bertambahnya penerimaan pada objek dan anggaran tidak dapat diasumsikan bahwa dari beberapa jenis pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan jika dikurusi penerimaan Bunga Dep mengalami kenaikan sebesar Rp 1.000.000.000,00, sehingga pada Tahun anggaran sebesar Rp 2.000.000.000,00 dari sebelumnya pada Tahun Rp 20.000.000,00; 2) Pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 15.000.000,00, sehingga pada tahun anggaran sebesar Rp 201.000.000,00 dari sebelumnya pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 35.000.000,00; 3) Pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 2.883.660.000,00, sehingga pada Tahun anggaran sebesar Rp 19.883.660.000,00 dari sebelumnya pada Tahun Anggaran Rp 17.000.000.000,00;

Untuk Jenis penerimaan Lain Pendapatan Asli Daerah yang mengalami penurunan adalah :

- 1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan men Rp 724.268,60, sehingga pada Tahun Anggaran 2018 dia Rp 309.231,95 dari sebelumnya pada Tahun Anggaran Rp 15.589.000,00.
- 2) Pendapatan Hasil Ekskuisisi mengalami penurunan sebesar sehingga pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar sebelumnya pada Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp 3.792.772

3) Pendapatan dari Pengembalian mengalami penurunan sebesar Rp pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp1.350.000,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.509.547.780,00;

Sementara terdapat jenis Pendapatan Asli Daerah yang tidak mengalami perubahan target yaitu :

- 1) Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp3.610.818.793,19
- 2) Penerimaan Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp8.000.000,00

## 2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp783.656.415.648,18,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp782.930.648,48. Kenaikan target penerimaan dana ini sesungguhnya disebabkan karena adanya alokasi Dana DAK Tahun Anggaran 2018 yang lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk alokasi target penerimaan dari Dana Transfer perubahan .

Menyesuaikan dengan perubahan peraturan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

### 1. Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum pada APBD Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp643.347.458,18 yang terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak APBD Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp25.771.210.260,18
- b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dan 2018 dianggarkan sebesar Rp33.868.698.388
- c. Dana Alokasi Umum pada APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp583.667.676.000,00

### 2. Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp140.348.050,00 yang terdiri dari :

- a. Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp67.489.557.000,00
  - 1) Bidang Pendidikan sebesar Rp6.233.881.000,00
  - 2) Bidang Kesehatan sebesar Rp8.855.874.000,00
  - 3) Bidang Infrastruktur Jalan sebesar Rp28.385.479.000,00
  - 4) Bidang Infrastruktur Irigasi sebesar Rp9.031.641.000,00
  - 5) Bidang Infrastruktur Air Minum sebesar Rp3.495.692.000,00
  - 6) Bidang Infrastruktur Sanitasi sebesar Rp4.946.707.000,00
  - 7) Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.653.634.000,00

- 8) Bidang Pertanian sebesar Rp2.759.434.000,00
  - 9) Bidang Pasar sebesar Rp1.672.215.000,00
- b. Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp 2.000.000,00 dari:
- 1) Dana Bantuan Operasional Kesehatan dianggarkan sebesar Rp1.680.000,00.
  - 2) Dana Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp500.000,00
  - 3) Dana Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar Rp10.998.000,00
  - 4) Dana Bantuan Operasional Kesehatan dianggarkan sebesar Rp808.266.911,00
  - 5) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp
  - 6) Dana Tunjangan Khusus Guru sebesar Rp9.398.077.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang
- Lain-lain Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp94.474.080,00, kita bandingkan dengan APBD murni Tahun 2017 sebesar Rp94.474.080,00, tidak terdapat perubahan rincian sebagai berikut :
- 1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp500.000.000,00.
  - 2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Kabupaten sebesar Rp2.909.564.472,07
  - 3) Dana Penyesuaian (Dana Desa dari APBN) sebesar Rp69.302.000,00
  - 4) Pendapatan lainnya dianggarkan sebesar Rp1.761.665.287,00
- Bantuan Keuangan lumpsum Payment PT ADARO INDONESIA dan 2) Tunggakan hasil penjualan tiket Avia Star sebesar Rp

**Tab 2**  
**Prakiraan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Barito**  
**Tahun Anggaran 201**

Jenis Penerima	Target Tahun 201	Target Tahun 201	Persenta Kenaikan/()
Pendapatan Asli Daerah	55.609.547	57.150.000	2,77
Pajak Daerah	17.397.454	17.284.403	-0,65
Retribusi Daerah	5427.131.0	6.096.709.	12,34
Hasil Pengelolaan Kekay Dipisahkan	5.253.635.	5.253.635.	0,00
Lainlain Pendapatan Asli Sah	27.531.327	28.515.251	3,57
Dana Perimbangan	782.930.914	783.656.415.	0,09
Dana Transfer Umum	782.930.914	783.656.415	0,09
Bagi Hasil Pajak /Bagi H	59.639.908	59.639.908	0,00
Dana Alokasi Umum	583.667.676	583.667.676	0,00
Dana Transfer Khusus	13523.330.0	140.348.831	0,52
DAK Fisik	65.817.342	65.489.557	
DAK Non Fisik	73.805.988	72.859.274	
Lainlain Pendapatan Dae	94.474.080	94.474.080	0,00
Pendapatan Hibah	500.00000	500.000.0	0,00
Bagi hasil Pajak Dari Pr Pemerintah Daerah Lain	22.909.564	22.909.564	0,00
Dana Penyesuaian dan C	69.302.851	69.302.851	0,00
Bant. Keu Prov./Pemda	0,0	0,0	0,00
Pendapatlainnya	1.761.665.	1.761.665.	0,00
<b>JUMLAH PENDAPAT</b>	<b>933.014.543</b>	<b>935.280.496</b>	

Sumber : Dinas Pendapatan Kab. Barito Selatan

### 3.2.1.2 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 201

Alokasi belanja bersumber dari dana APBD yang diperkirakan mencapai Rp 948.018.254.746,97 sebesar 94,23% atau sebesar 66% bila dibandingkan dengan belanja daerah sebesar Rp 26.310.511,25

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung (BTL) pada Tahun Anggaran 201 diperkirakan mencapai Rp 4.808.055.764,28 sebesar 7% bila dibandingkan dengan Anggaran 201 sebesar Rp 1.105.612,50.

Sedangkan untuk Belanja pada APBD yang diperkirakan mencapai Rp 2.312.850,00 atau sebesar 0,24% atau sebesar 31% bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 201 sebesar Rp 285.400

#### A. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 201

belanja daerah tahun 2011 untuk pelaksanaan urusan pemerintah menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai wajib terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang paling mendasar meliputi: a) kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan permukiman; e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan; Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak pelayanan dasar meliputi: a) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; b) pariwisata; c) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g) perhubungan; h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i) perhubungan; j) koperasi, usaha kecil, dan menengah; l) penanaman modal; n) statistik; o) persandian; p) kebudayaan; q) perikanan dan perikanan. Pilihan meliputi : a) kelautan dan perikanan; b) pariwisata; c) pertambangan, energi, dan perikanan; d) perdagangan, g) perindustrian; dan h) transportasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, bagi Pemerintah Kabupaten Belitang belanja daerah diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan infrastruktur, dan didukung dengan pengaturan pola pembiayaan proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

- 1) Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara
- 2) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola kinerja dengan pendekatan yang didasarkan pada laporan yang akurat
- 3) Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Anggaran Partisipasi Sekolah (AMH dan APS).

- 4) Meningkatkan basis anggaran untuk kreasi dan inovasi, dipertegas sesuai perintah Pasal 171 Ayat 1 dan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan dan aksesibilitas pelayanan dasar kesef indeks kesehatan masyarakat.
- 5) Mengklasifikasi kebutuhan belanja reguler dan khusus terukur dan terarah, yaitu:
  - a) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsung listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobi
  - b) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, kon & evaluasi, dan perencanaan;
  - c) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang menggiatkan pembangunan yang menjadi prioritas, program/kegiatan yang Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- 6) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah dialokasikan untuk bidang infrastruktur jalan dan minimal 10% dari perolehan pajak kendaraan bermotor dan bal bermotor.
- 7) Meningkatkan alokasi anggaran bidang ekonomi yang makin kesejahteraan masyarakat
- 8) Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, t proporsional, pemerataan, dan penyesuaian anggaran belanja untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebel
- 9) Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan be misi Pemerintah bersama belanja yang direncanakan oleh setiap tetap terukur.

#### B. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Kebijakan Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Sosial, Belanja Belanja Bantuan, dan Belanja Tidak Langsung komponen/kelompok belanja yang termasuk dalam anggaran Belar masing komponen belanja dimaksud adalah sebagai berikut :



a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan kompensasi, dalam bentuk gaji dan penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk uang representasi dan tunjangan anggota DPRD, tugas dan insentif kepala daerah dan wakil kepala daerah, penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2017 Belanja Pegawai di Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp 1.533.553.200,00. Komponen Belanja Pegawai ini digunakan untuk penerimaan pegawai baru dan kenaikan atas tunjangan hari raya.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga kewajiban pokok pinjaman (Oustan) berdasarkan perjanjian pinjaman pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Belanja bunga untuk sementara ditangguhkan karena pemerintah kabupaten Barito Selatan tidak memiliki pinjaman.

c. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga yang produksinya terjangkau oleh masyarakat. Belanja Subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut pelayanan publik yang dianggarkan sebesar Rp 1.000.000.000,00 yang diperuntukkan kepada PDAM Kabupaten Barito Selatan.

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lain, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2017 Belanja Hibah di Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp 376.180.000,00 sebesar 24,52% dari total sebesar Rp 1.533.553.200,00. Penurunan belanja hibah dalam rangka pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan telah dilaksanakan pada Tahun 2017 yang lalu.

e. Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang kepada individu, kelompok, atau masyarakat yang sifatnya menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kesulitan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Pedoman Pemberian Hibah Sosial dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasal 23 menyatakan: pertimbangan dalam penyalangan adalah sebagai berikut:

1. Individu, keluarga, masyarakat yang mengalami keadaan yang dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena kebutuhan hidup minimum.
2. Lembaga non pemerintah pendidikan, keagamaan, dan bidang lain untuk melindungi individu, kelompok, masyarakat dari kemiskinan sosial.

Pada tahun 2018 Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp7.600.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.000.000.000,00 jika dibandingkan dengan anggaran yaitu sebesar Rp6.600.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota kabupaten/kota pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) point b, Undang-Undang Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disempurnakan pengaturannya dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Tahun 2014 tentang Desa khususnya pada Pasal 72 Ayat (3), telah ditetapkan Bagi Hasil paling sedikit sepuluh per seratus untuk Desa dan Kabupaten sebagai bagian diperuntukkan bagi desa.

Pada Tahun 2018 Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp55.652.846.804,44 persen dari yang dianggarkan pada tahun Rp2.282.458.506,20 dan merupakan anggaran yang disediakan untuk menganggarkan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar 10 persen Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp172.840.372,05, sedangkan untuk belanja hasil restidua daerah juga dianggarkan sebesar 10 persen dari total Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp937.908,50. Kenaikan anggaran dana bagi hasil pajak kepada pemerintah desa tidak dapat dilakukan karena pada tahun 2018 mengalami kenaikan jumlah anggaran yang ditandingkan Tahun 2017

g. Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan khusus atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan Tahun 2018 Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp1.042.523,52 atau sebesar 10,24 persen yang dianggarkan pada tahun 2017

sebesar Rp. 3.365.330,30. Kenaikan anggaran akan dilaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 72 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dimana Pemerintah Kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemerintah Desa dalam jenjang kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari Belanja Anggaran Keuangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota setelah dikurangi. Selain poin diatas, langkah utama keuangan adalah dalam mengantisipasi program pemerintah pusat untuk sebesar Rp. 1 Milyar Rupiah tiap Desa. Belanja Anggaran Keuangan Kabupaten Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebagai APBD berikut :

1) Transponder TVRI (Pemprov Kalteng)	Rp. 450.000.000,00
2) Alokasi Dana (ADD) Desa	Rp. 643.375.846,82
3) Bantuan untuk Partai Politik	Rp. 668.990,00
4) Dana Desa dari APBN	<u>Rp. 693.025.100,00</u>
J U M L A H	Rp. 1.375.200.846,82

h. Belanja Tak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah yang berulang seperti penanggulangan bencana alam dan ancaman sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan sebelumnya yang diduduki oleh yang sah. Pada tahun 2017 Belanja Anggaran Keuangan dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,00 yang dianggarkan pada tahun 2017.

C. Kebijakan Belanja Langsung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tentang Perubahan dan Mentasi Dalam Negeri Nomor 101 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah untuk penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan pemerintah konkuren di wilayah daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak termasuk pelayanan dasar.

Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

kualitas pelayanan publik dan keberpaha kapapamlepretratingan p  
Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan  
terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan M  
pada standar teknis dan margsesatuakderegion peraturan perunc  
undangan.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan  
pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar c  
berpedoman pada amahisigastardan regional. Alokasi belanja ur  
kegiatan pada masing gurusan pemeebuta da at ats,rsdigunadasa  
sebagai penyusunan SKRIDA

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Kebijakan belanja  
rancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Uratuhn m20ndar  
kegiatan yang menjadi skala prioritas pembangsuhana Kabupaten  
Musrenbang RKPD yang dilaksakanant 1200a gta megrupla 2an kesepaka  
paratakechersantara lain sebagai berikutrangka mendukung prograr  
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito 2 522 ayant ut esreblah ap et er di

1. Peningkatan infrastruktur fisik Sarana dan Prasarana
  - a. Pembarugudan peningkatan jalan dan jembatan antara desa kabupaten
  - b. Peningkatan sarana air bersih
  - c. Pembangunan listrik dam mewujudkan Barsel terang
  - d. Peningkatan sarana transportasi darat, air dan udara
  - e. Pengembangan wilayah perkotaerangadame pge bslam tata ruang wilayah
  - f. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat
  - g. Mereview Rancangan Tata Ruang Kota, Rencana Tata Ruan
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Ceri
  - a. Penyediaan fasilitas an gese mada i, tenaga medis dan paramede dengan sistem pelayanan kesehatan yang murah dan muda
  - b. Peningkatan pelayanan kesehatan khusus ibu dan anak ser kelahiran dan santunan kematian bagi keluarga tidak mam
  - c. Menyedia karr rluak huni, melalui kegiatan perbaikan ruma lingkungan yang sehat
  - d. Mendorong pelaksanaan wajib belajar 12 Tahun dan adanya internasional
  - e. Menyediakan sarana pendidikan PAUD, SD, dan SMP diseti SM dan SMK di setiap Kecamatan, menyiapkan tenaga Penc Beasiswa

- f. Mengembangkan perpustakaan desa dan sarana informasi
- g. Membangun sarana prasarana pembinaan generasi muda
- 3. Peningkatan Ekonomi Berbasis Lokal dan Lingkungan
  - a. Mengembangkan Sentra Ekonomi Berbasis Kecamatan sebagai
    - 1. Dusun Selatan, sebagai pusat pemerintahan, kota pendidikan pengembangan pertanian dan perikanan
    - 2. Dusun Utara, pengembangan perkebunan dan pertanian
    - 3. Gunung Bintang Awa, Peningkatan Industri Pertambangan dan Perikanan
    - 4. Karau Kuala, Pengembangan Industri rotan berkualitas ekspor
    - 5. Jenamas. Pengembangan Komoditi ternak kerbau rawa dan perikanan
    - 6. Dusun Hilir, Pengembangan pertanian sawah kualitas ekspor
  - b. Meningkatkan Kapasitas lokal menjadi wirausaha
  - c. Menciptakan lapangan kerja baru guna menampung tenaga kerja
  - d. Memperkuat fungsi pasar dan Koperasi UMKM sebagai penggerak ekonomi
  - e. Mengembangkan potensi wisata alam dan investasi di bidang pariwisata
  - f. Meningkatkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan
- 4. Peningkatan kerukunan hidup beragama, sosial dan budaya
  - a. Menyediakan sarana prasarana ibadah, tenaga kerohanian agama
  - b. Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam pembangunan sosial
  - c. Meningkatkan budaya gotong royong masyarakat
  - d. Menata kelestarian alam hulu dan hilir serta penanggulangan banjir
  - e. Melestarikan adat istiadat dan kebudayaan daerah setempat berkearifan lokal
  - f. Membina organisasi kemasyarakatan, keagamaan, sosial politik dan budaya dan pembinaan suku terasing
- 5. Pengelolaan tata pemerintahan yang baik
  - a. Rekrutmen dan penempatan aparatur pemerintah daerah yang sesuai kemampuan dan kebutuhan daerah
  - b. Pelayanan yang cepat, ramah dan mudah bagi masyarakat serta bebas korupsi dan nepotisme
  - c. Mendukung dan mendorong inovasi dan profesionalisme aparatur
  - d. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung di bagi menjadi jenis belanja yang terdiri dari: a) Belanja Pegawai b) Belanja Modal c) Belanja Modal Prakerja d) Belanja Modal Prakerja e) Belanja Modal Prakerja f) Belanja Modal Prakerja



Berdasarkan asumsi pembiayaan yang ditargetkan : Rp 39.366.694.486,74 asumsi untuk pengeluaran pembiayaan ditargetkan Rp 5.878.000.000,00 demikian Pembiayaan Netto pada Struktur 2018 sebesar Rp 33.488.694.486,74

C. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan

Mengingat besarnya defisit anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp 247.292.287,74 sementara dari sisa pembiayaan netto ditargetkan Rp 33.488.694.486,74 dengan demikian pada tahun anggaran 2018 Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Berkenaan adalah sebesar Rp 21.61302.158,00 lebih Pembiayaan (SiLPA) Berkenaan tersebut adalah merupakan dana dari Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Prakiraan Target Pembiayaan Daerah di tahun 2018 ditunjukkan tabel 3.

Tabel 3.  
Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2018

III	PEMBIAYAAN	APBD 2018	APBD 2019
	a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.189.767,00	39.366.694,49
	SiLPA	15.189.767,00	39.366.694,49
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
	b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.878.000,00	5.878.000,00
	Penyertaan Modal (Investasi) pada Bank Kalteng	5.878.000,00	5.878.000,00
	Penyertaan Modal PT.JAMKRI	-	-
	Pembayaran Pinjaman Bersyarat ASKES	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	9.311.767,00	33.488.694,49
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN BERKENAAN	0,00	21.61302.158,00

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

### 4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab terdahulu, Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang ikut melaksanakan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2017. Dari hasil Pilkada serentak tersebut, telah terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan 2017-2022. Visi dan Misi yang dijunjungkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan 2017-2022 adalah sebagai berikut:

**Visi:** "Membangun Kabupaten Barito Selatan sebagai Daerah yang Maju dan Mandiri sehingga Masyarakat yang Sejahtera Secara Berkelanjutan dan Taqwa".

**Misi:** Untuk mewujudkan Visi dimaksud, telah ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Membenahi infrastruktur (Jalan, jembatan, listrik, kesehatan, air bersih dan lain-lain), dalam menunjang pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan pendidikan, dan kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan pendidikan, dan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan pendidikan, dan kualitas pelayanan publik.

Menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk mewujudkan visi tersebut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan melaksanakan pembangunan ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang berbasis SDA dengan mengutamakan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan meningkatkan rasa kebersamaan dan kesempatan bagi masyarakat Kabupaten Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan menjaga kelestarian budaya, adat istiadat, dan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan meningkatkan pelayanan publik dengan menerapkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

Berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan 2017-2022 tersebut, maka telah dirumuskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan, dimana tujuan pembangunan dimaksud tentunya dibuat dengan tetap berpedoman dan telah ditetapkan dalam Sasaran pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara nasional tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan dalam Sasaran 9 (sembilan) agenda pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2015-2019), dengan skala prioritas sebagai berikut :

1. Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pelayanan lingkungan hidup, pelayanan budaya, pelayanan olahraga, dan pelayanan pariwisata bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, serta pembangunan karakter bangsa, budaya, kearifan lokal, dan cinta tanah air serta bela negara.



2. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, peningkatan produktivitas dan biaya operasi dan pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera.
3. Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat pinggiran serta antarkawasan. Hal tersebut bertujuan agar terdapat antarwilayah yang seimbang, yang dapat mengurangi-kesenjangan masing wilayah.
4. Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur yang mendukung energi, pariwisata, maupun stabilitas dan kedaulatan pangan tersedia jaringan infrastruktur perhubungan dengan berbagai moda transportasi mendorong efisiensi dan efektifitas dan aksesibilitas serta dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi.
5. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain pelatihan, pendampingan dan sosialisasi kepada aparatur di setiap bidang tugas dan fungsi masing

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Pro 2018, telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan yaitu :

1. Terealisasinya perencanaan pembangunan yang konsisten.
2. Meningkatkan konektivitas antar daerah.
3. Meningkatnya kecukupan energi.
4. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan.
5. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatnya daya beli masyarakat.
7. Meningkatnya sektor ekonomi
8. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
9. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
10. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
11. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
12. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah.
13. Meningkatnya kualitas pendidikan.
14. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
15. Terpasarkannya destinasi wisata.
16. Menurunnya degradasi lingkungan.
17. Meningkatkan pendapatan daerah.

Berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan di atas, maka dirumuskan kebijakan pembangunan yaitu :

1. Terwujudnya pembangunan infrastruktur antara lain : 1) Infrastruktur jalan, jembatan, dan transportasi yang mendukung produk seperti irigasi perdesaan, dan jalan usaha tani; dan 3) In pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti penyediaan perdesaan.
2. Meningkatnya kualitas pendidikan.
3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
4. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan.
5. Meningkatnya pendapatan masyarakat.
6. Meningkatkan produktivitas ekonomi kerakyatan dan daya saing kom
7. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan b
8. Meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur.
9. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik masyarakat.
10. Meningkatnya kerukunan hidup dan toleransi masyarakat.
11. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
12. Meningkatnya daya beli masyarakat.
13. Peningkatan pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah.

#### 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Secara Nasional, untuk tahun 2018 terdapat 10 (sepuluh) Pri

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Perumahan dan Permukiman;
4. Pengembangan Dunia Usaha dan
5. Ketahanan Energi;
6. Ketahanan Pangan;
7. Penanggulangan Kemiskinan;
8. Infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman;
9. Pembangunan Wilayah; dan
10. Politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Untuk Prioritas Pembangunan Perencanaan Tata Ruang Tahun 2018 adalah :

1. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah.
2. Pemerataan infrastruktur wilayah.
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan, pesisir dan
4. Stabilitas ekonomi daerah.
5. Peningkatan pendapatan masyarakat.
6. Peningkatan tata kelola administrasi birokrasi.
7. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkua
8. Pengelolaan industri pariwisata.
9. Pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanj
- 10 Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi (IRADi).Pendapatan Asli D

Memperhatikan pembangunan baik yang akan dilaksanakan Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat difokuskan dalam rangka :

1. Pembangunan infrastruktur dan transportasi komunikasi, dan ir pemanfaatan tata ruang.
2. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana ba kependidikan khususnya untuk pendidikan dasar.
3. Penyediaan psasama dan infrastruktur pe ndidikan dan kes
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan industri pariwisata.
6. Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi kerakyatan dan
7. Pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur.
8. Stabilitas kehidupan sosial politik masyarakat.
9. Pengembangan kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan :
- 10 Peningkatan Penerimaan Daerah terutama Pendapatan Asli Dae

BAB V  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta ke sebelumnya, disusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan pemerintahan dengan prioritas terorganisir indikator kinerja program mendukung program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan 2017-2022 yaitu sebagai berikut

1. Peningkatan infrastruktur fisik Sarana dan Prasarana
  - a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan jembatan antara desa, dan ke kabupaten
  - b. Peningkatan sarana air bersih
  - c. Pembangunan listrik dan mewujudkan BERSALU terang
  - d. Peningkatan sarana transportasi darat, air dan udara
  - e. Pengembangan wilayah perkotaan dan pedesaan dengan wilayah
  - f. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat
  - g. Mereview Rancangan Tata Ruang Kota, Rencana Tata Ruang
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas
  - a. Penyediaan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan dengan sistem pelayanan kesehatan yang murah dan mudah
  - b. Peningkatan pelayanan kesehatan khusus ibu dan anak serta kelahiran dan santunan kematian bagi keluarga tidak mampu
  - c. Menyediakan rumah layak huni, kegiatan perbaikan rumah dan pe lingkungan yang sehat
  - d. Mendorong pelaksanaan wajib belajar 12 Tahun dan adanya internasional
  - e. Menyediakan sarana pendidikan PAUD, SD, dan SMP disetiap SMA Dan SMK Kecamatan, menyiapkan tenaga Pendidik dan
  - f. Mengembangkan perpustakaan desa dan sarana informasi pe
  - g. Membangun sarana prasarana pembinaan generasi muda dan
3. Peningkatan Ekonomi Berbasis Lokal dan Lingkungan Hidup
  - a. Mengembangkan Sentra Ekonomi Berbasis Kecamatan sebagai be
    1. Dusun Selatan, sebagai pusat pemerintahan, kota pendidikan pengembangan pertanian dan perikanan
    2. Dusun Utara, pengembangan perkebunan dan pertanian
    3. Gunung Bintang Awai, Berencana tambangan dan Pertanian
    4. Karau Kuala, Pengembangan Industri rotan berkualitas ek
    5. Jenamas. Pengembangan Komoditi ternak kerbau rawa da
    6. Dusun Hilir, Pengembangan pertanian sawah kualitas eks

- b. Meningkatkan Kapasitas tenaga kerja lokal
  - c. Menciptakan lapangan kerja baru guna menampung tenaga kerja
  - d. Memperkuat fungsi pasar dan Koperasi UMKM sebagai penggerak
  - e. Mengembangkan potensi wisata alam dan investasi di bidang
  - f. Meningkatkan sistem pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan
4. Peningkatan kerukunan hidup beragama, sosial dan budaya
    - a. Menyediakan sarana prasarana ibadah, tenaga keagamaan dan agama
    - b. Meningkatkan pemberdayaan dalam pembangunan sosial budaya
    - c. Meningkatkan budaya gotong royong masyarakat
    - d. Menata kelestarian alam hulu dan hilir serta penanggulangan
    - e. Melestarikan adat istiadat dan kebudayaan daerah setempat beserta
    - f. Membina kesadaran masyarakat, keagamaan, sosial politik dan pembinaan suku terasing
  5. Pengelolaan tata pemerintahan yang baik
    - a. Rekrutmen dan penempatan aparatur pemerintah daerah yang kemampuan dan kebutuhan daerah
    - b. Pelayanan yang ramah dan mudah bagi masyarakat yang bebas dan nepotisme
    - c. Mendukung dan mendorong inovasi dan profesionalisme aparatur
    - d. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan

Kemudian sebagai bagian ini disajikan Keajaiban Daerah (RKP Kabupaten Barito Selatan dan Urusan dan Perangkat Daerah) sebagaimana tabel sebagai berikut :

## BAB VI

### PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (RKPD) memuat Visi dan Misi serta Program Prioritas Pembangunan. RKPD juga merupakan kompilasi dari Rencana Kerja jangka menengah (Kabupaten Barito Selatan) yang didasarkan pada prioritas.

Dengan tersusunnya RKPD diharapkan perencanaan dan penganggaran dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel. Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana dapat diantisipasi lebih awal. Demikian hasilnya dapat dirasakan seluas-luasnya adil dan merata bagi masyarakat Barito Selatan.

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

